

297.432
R00
p. 21

**PENGARUH HUKUM WARIS ISLAM
TERHADAP HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN DEMAK**

**TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

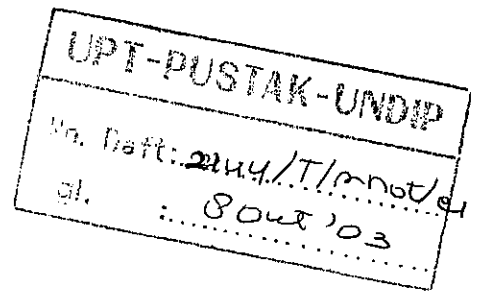


Oleh:
BETTY ROSSANTY, S.H.
B4B000103

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

TESIS



**PENGARUH HUKUM WARIS ISLAM
TERHADAP HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN DEMAK**

Oleh:

**BETTY ROSSANTY, S.H.
B4B0000103**

Telah Disetujui

Oleh:

Dosen Pembimbing,

Prof. Ign. Suganggo, S.H.

Tanggal,

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS
ADAT PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK**

Oleh:

BETTY ROSSANTY, S.H.
NIM. B4B000103

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

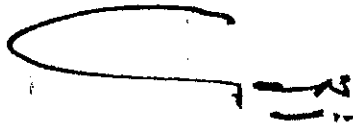
Pada tanggal ... **6/6** ... **2003**

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

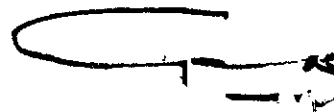
Mengetahui

Dosen Pembimbing

Ketua Program



Prof. Ign. Sugangga, S.H.



Prof. Ign. Sugangga, S.H.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ISLAMIC HEIR REGULATION TOWARDS TRADITIONAL ONE IN DEMAK REGENCY

By : Betty Rossanty, S.H.

Traditional law is the most important component of a nation's identity, therefore it takes a position as the base of the national law order. One of the fields of traditional law in purpose of constructing the national law is the traditional heir regulation. The traditional heir regulation plays a very important role since a product of national laws will be obeyed by its citizens if it has the sense of justice and nation personality.

The aim of the research is to observe how far the influence of heritage law in Islam towards the traditional heir regulation is, since between the two sides are some principal differences including the problem of heritage distribution, the heirs and the opened heritage. This aim was decided because the society who submit to the traditional law are mostly Islamic.

The research used a qualitative method by juridic empirical approach. The research subject is determined by purposive sampling. The subjects are the party who gives the heritage and that who receives it.

According to the result of the research done in Demak society who are religious, it can be concluded that the traditional heir regulation in Demak society is influenced by the religion factor, even a little. The influences it self is not spread evenly. In a little part of society, those who live in the school of Koranic studies (traditional muslim school), the process of giving heritage lasts when the heritage givers passes away. In addition, the distribution is different between the sons and daughters. In fact, Demak society generally base their regulation on the traditional law in which the process of heritage giving can be done before the givers dies. The distribution is also based on equality. Thus, in the case of the position of a widow whi begins to be known as one of the heirs and an adopted child who is positioned out of the heirs as the influence of Islamic heir regulation and the change in society's method of thinking to a modern an rationalistic society.

As the result of the different process of heritage distribution done by Demak society who in major base the heir regulation on tradition, and the other part who are still keep in faith with Islamic regulation, there is a sort of contact and adjustment between both. However, the influence of Islamic regulation have not touched yet the whole traditional regulation on heir.

ABSTRAK

PENGARUH HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK Oleh : Betty Rossanty, S.H.

Hukum Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada suatu bangsa, karena itu Hukum Adat mempunyai kedudukan sebagai landasan tata Hukum Nasional. Salah satu dari bidang Hukum Adat untuk pembinaan Hukum Nasional adalah Hukum Waris Adat yang sangat besar peranannya, sebab suatu produk Hukum Nasional akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh rakyat Indonesia, apabila memenuhi rasa keadilan sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia.

Oleh karena masyarakat asli Indonesia yang tunduk kepada Hukum Adat itu sebagian besar beragama Islam, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh kewarisan yang terdapat dalam Hukum Islam terhadap Hukum Waris Adat, mengingat antara keduanya mempunyai beberapa perbedaan prinsip antara lain menyangkut masalah pembagian harta warisan, ahli waris dan terbukanya harta warisan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penentuan subyek penelitian ditentukan secara purposive sampling. Subyek penelitian meliputi pihak yang pernah melakukan pewarisan dan menerima pewarisan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Demak yang bersifat agamis dapat dikemukakan bahwa Hukum Waris Adat pada masyarakat Demak sedikitnya telah terpengaruh oleh faktor agama (Islam), namun pengaruhnya tidak merata. Pada sebagian kecil masyarakat yang tinggal di lingkungan pondok pesantren, proses pewarisan hanya berlangsung setelah pewaris meninggal dunia, pembagian jumlah harta warisnya dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada masyarakat Demak pada umumnya tetap mendasarkan pada Hukum Adat dimana proses pewarisan dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia, serta pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki dan perempuan menggunakan asas kesamaan. Demikian dalam hal kedudukan janda yang telah mulai dikenal sebagai ahli waris serta kedudukan anak angkat yang diletakan di luar ahli waris sebagai akibat pengaruh Hukum Waris Islam sekaligus sebagai akibat berubahnya alam pikiran masyarakatnya menuju masyarakat modern yang rasionalistis.

Dengan bermacam pelaksanaan proses dan pembagian warisan yang dilakukan pada masyarakat Demak yang sebagian besar mendasarkan pada Hukum Adat dan sebagian kecil lainnya pada Hukum Islam, maka dengan gambaran tersebut telah terjadi kontak dan persesuaian diantara keduanya, meskipun pengaruh Hukum Islam dirasakan belum seluruhnya menyentuh Hukum Waris Adat.

MOTTO

Barang siapa yang mengerjakan perbuatan kebaikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, lagi pula ia orang yang beriman, akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, sedangkan di akhirat diberikannya pula pembalasan pahala tiada tara, jauh lebih baik dari apa yang mereka perbuat.

An-Nahl: 97

Kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, adalah karunia yang disediakan Tuhan untuk orang-orang yang dapat memenuhi dua syarat “beriman” serta “beramal salih”, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama mendapatkan karunia itu.

Apabila kamu bersedih, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah, ... dan apabila kamu bahagia bersyukurlah kepada-Nya pula.

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang tulus kupersembahkan:

Tuk Almarhum ayahanda Cahyo Sudarmono, SH
(semoga engkau melihatnya di sana...).

Ibundaku terkasih yang selalu mendoakan aku.

Suamiku Candraditya Imanda dan anakku tercinta Fadly,
serta kakak-kakakku, semua keluarga yang telah
memberikan dorongan dan semangat selama ini,

Semoga perjuangan ini dapat kalian terima sebagai tanda
terima kasihku dan baktiku atas segala yang telah kalian
berikan, sekaligus menjadi awal dari sebuah harapan dan
cita-cita.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul:

“Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat di Kabupaten Demak.”

Mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Waris di Indonesia.

Dalam penyusunan tesis ini penulis betul-betul menyadari dan mengakui bahwa semua tak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Soeharyo Hadi Saputra, dr. Sp. PD (K), selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. I.G.N Sugangga, SH, selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga terselesainya tesis ini.

4. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum, selaku sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Tim Review Proposal Penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
6. Bapak Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan tambahan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H., MH., selaku Dosen Wali yang telah membantu selama mengikuti perkuliahan di Universitas Diponegoro
8. Pihak-pihak di lokasi penelitian yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data sehingga terselesainya tesis ini, yaitu Camat Demak, Camat Sayung, Camat Wonosalam, beserta stafnya.
9. Ketua Pengadilan Negeri Demak dan ketua Pengadilan Agama Demak beserta stafnya yang telah memberikan informasi dan bahan-bahan penelitian bagi penulis.
10. Pondok Pesantren Al Hiqmah Kecamatan Wonosalam yang juga telah memberikan informasi kepada penulis.
11. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
12. Almamater tercinta yang akan selalu kukenang.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.

Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak lupa penulis mengharapkan kritik dan saran demi kemajuan dan perkembangan penulis selanjutnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Semarang, Mei 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam.....	8
B. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam	15
C. Proses Pewrisan dan Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat.....	21
D. Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Adat.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	41
B. Penentuan Lokasi Penelitian.....	42

C. Penentuan Subjek Penelitian (Responden)	44
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Teknis Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian.....	47
A1. Pendahuluan.....	47
A2. Sejarah Singkat Kota Demak	48
A3. Tinjauan Umum Kabupaten Demak	50
a. Letak Geografis	50
b. Keadaan Masyarakat di Kabupaten Demak.....	51
A4. Tinjauan Umum Responden	52
B. Pembahasan	55
B1. Pelaksanaan Pewarisan	56
B2. Harta Warisan.....	64
B3. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya	66
B4. Anak Angkat	76
B5. Penyelesaian Sengketa Pewarisan.....	78
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR TABEL	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Adat merupakan suatu pencerminan dari kepribadian bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, tiap-tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri, satu dengan yang lainnya tidak sama. Dengan adanya ketidak samaan ini dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan, karena adat itu sendiri berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan dalam masyarakat.

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan aturan- aturan tingkah laku baik yang berupa aturan hukum maupun yang bukan aturan hukum. Namun dalam kenyataan ini, belum nampak mana yang adat dan mana yang Hukum adat. Sehingga adat dan hukum adat berjalan seiring dan tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya mungkin dibedakan sebagai adat yang mempunyai akibat hukum dan adat yang tidak mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian Hukum Adat hanya merupakan sebagian dari adat istiadat suatu masyarakat, sehingga untuk menelaah hukum adat harus mampu membedakan antara adat dan Hukum Adat. Untuk itu diperlukan suatu batasan atau atribut untuk membedakan antara adat dan hukum adat.

Pada dasarnya untuk membedakan antara adat dan Hukum Adat memerlukan suatu kriteria yang dapat dijadikan pedoman. Kriteria yang digunakan adalah berupa batasan dan atribut yang diberikan kepada gejala hukum adat itu, yang berupa sanksi atau akibat hukum. Adat adalah aturan

tingkah laku yang kebenarannya telah mendapat pengakuan dari masyarakat, sedangkan Hukum Adat adalah aturan tingkah laku mempunyai kekuatan mengikat yang kemudian merupakan pedoman bertingkah laku “hukum” yang mempunyai akibat hukum dan ditetapkan sebagai hukum. Van VollenHoven memberikan suatu batasan untuk membedakan antara adat dan Hukum Adat.

Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang Pribumi dan Timur Asing pada suatu pihak yang mempunyai sanksi (karenanya bersifat “hukum”) dan pada pihak lain berada dalam keadaan yang tidak dikodifikasikan (karenanya bersifat “adat”)¹⁾

Jadi perbedaan antara adat dan Hukum Adat adalah hanya adat yang bersanksi mempunyai sifat hukum serta merupakan Hukum Adat.

Demikian pula Soekanto mengemukakan bahwa : Hukum Adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.²⁾

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa yang membedakan adat dan Hukum Adat adalah ada tidaknya unsur paksaan atau sanksi.

Hukum Adat mempunyai sifat dinamis dan plastis, artinya bahwa hukum adat dapat berubah-ubah selaras perkembangan masyarakat dan rakyat sebagai pernyataan rasa keadilan dan kepatutan rakyat, perkembangan adat sejalan dan secepat dengan perkembangan kehidupan rakyat dalam masyarakat.

Dengan demikian Hukum Adat yang timbul berakar dari kenyataan hidup dalam masyarakat, proses pengkaidahannya tergantung pada kekuatan dan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Meskipun berlakunya Hukum Adat tidak tergantung pada kekuasaan negara, peraturan

¹⁾ Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 1981), hal. 14

²⁾ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1981), Hal. 18.

perundang-undangan) karena sifatnya yang tidak tertulis, namun antara sistem perundang-undangan dan Hukum Adat tidak dapat dipisahkan.

Hukum Adat telah diakui eksistensinya sejak dalam tata hukum Hindia Belanda, hal ini didasarkan pada ketentuan peralihan pasal 131 Indische Staatstregeling (IS), yaitu hakim dapat menerapkan Hukum Adat dalam menyelesaikan perkara privat antar golongan asli selama belum ada kodifikasi, asalkan tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang diakui umum. Jadi dengan demikian selama kodifikasi belum dilaksanakan maka Hukum Adat tetap berlaku, sehingga pada saat itu di Indonesia tetap berlaku dua sistem hukum yaitu Hukum Adat dan Sistem Hukum Barat.

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 suatu titik berakhirnya dualisme sistem hukum. Karena meskipun belum semua lapangan hukum terbentuk hukum nasional yang dikehendaki. khususnya dalam lapangan hukum perdata masih berlaku ketentuan hukum lama, namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara ideal tersirat sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum nasional yang didukung oleh kesatuan bangsa-bangsa, bahasa dan tanah air.

Pada tahun 1960 pemerintah menunjukkan suatu sikap yang riil dan lebih mantap untuk mewujudkan suatu sistem hukum nasional yang unsur-unsurnya didasarkan pada Hukum Adat yaitu dengan diberlakukannya ketetapan MPRS No. II / MPRS / 1960 yang menyatakan , bahwa di dalam usaha ke arah homogenitas hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. Kemudian di dalam perumusannya asas pembangunan hukum nasional harus sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan Hukum Adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tersebut, maka menjadi jelas kedudukan dan peranan Hukum Adat dalam pembinaan hukum nasional yaitu sebagai landasan tata hukum nasional. Salah satu dari bidang Hukum Adat untuk pembinaan hukum nasional adalah Hukum Waris Adat, oleh karena itu bahan-bahan Hukum Waris Adat perlu diketemukan untuk mencari titik temu dari berbagai sistim hukum dan asas Hukum Waris Adat yang terdapat diseluruh nusantara.

Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah agama. Seperti halnya pada masyarakat Bali banyak dipengaruhi oleh agama Hindu. Sedangkan agama Islam yang masuk ke Indonesia pada awal abad ke-15 dan tersebar dengan pesat, pengaruh terbesarnya nyata sekali terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan Islam sudah menjadi hukum perkawinannya sendiri bagi masyarakat Islam (telah terjadi resepsi Islam). Demikian juga mereka yang beragama Kristen, Hindu, dan Budha. Pelaksanaan perkawinan tersebut secara yuridis formal telah diakui dalam Undang-Undang Perkawinan (UU nomor 1/ Tahun 1974) pasal 2 ayat 1 yaitu Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dengan demikian hukum adat mampu menerima (mereseptir) pengertian-pengertian dan lembaga-lembaga yang berasal dari hukum asing termasuk Hukum Islam tersebut, yang berlaku sebagai hukum sendiri serta menjelma menjadi hukum baru. Oleh karena itu dalam perkembangan Hukum Adat pengaruh agama (Islam) juga cukup besar, karena ajaran-ajarannya berkaitan langsung dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya

meskipun pengaruh resepsi masyarakat terhadap Hukum Islam tidak sama kuatnya di seluruh wilayah Indonesia. Seperti di Jawa dan Madura resepsi Hukum Islam dalam hukum perkawinan dapat dikatakan sudah kuat, hal ini terlihat misalnya suatu perkawinan dianggap sah apabila ijab dan kabul dilakukan sesuai dengan Hukum Islam, sedangkan di daerah Lampung bahwa eksistensi Hukum Adat masih kuat sehingga sahnya perkawinan disamping harus dilakukan ijab dan kabul juga harus diikuti upacara-upacara adat. Hal ini berhubungan erat dengan hak dan kewajiban anggota keluarga dalam sistim kekerabatan yang dianutnya (sistim patrilineal).

Resepsi Hukum Islam oleh Hukum Adat sedemikian rupa sehingga kadang-kadang sulit membedakan antara mana yang Hukum Adat asli dan mana Hukum Adat yang telah dipengaruhi oleh hukum agama, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam. Beberapa sarjana hukum adat antara lain, Soepomo menyatakan Hukum Adat adalah hukum non statutair (hukum tidak tertulis) yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil Hukum Islam (agama) dengan demikian hukum adat mempunyai dua unsur yaitu sebagian besar terdiri dari hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dan sebagian kecil hukum agama yang bersifat tertulis.³⁾ Sehubungan dengan unsur Hukum Adat, khususnya unsur asli dapat dilihat bahwa Hukum Adat itu mempunyai sifat tradisional, artinya Hukum Adat itu bersifat turun temurun dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.

Oleh karena masyarakat asli Indonesia yang tunduk kepada Hukum Adat itu sebagian beragama Islam, maka dalam rangka mengetahui seberapa besar pengaruh dan peraturan kewarisan yang terdapat dalam hukum agama

³⁾ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Jakarta : Pradnya Paramitha), Hal. 83

Islam terhadap Hukum Waris Adat. penulis mengkaji penelitian tentang “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Adat pada Masyarakat di Kabupaten Demak” mengingat antara Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam mempunyai beberapa perbedaan prinsip antara lain menyangkut masalah pembagian harta warisan, ahli waris, dan terbukanya harta warisan.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis mengadakan pembatasan ruang lingkup untuk lebih mengena obyek yang akan diteliti mengingat luasnya permasalahan serta keterbatasan waktu, biaya, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis dengan maksud agar masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan semula dan tetap relevan dengan judulnya, yaitu “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Adat pada Masyarakat di Kabupaten Demak”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat ditarik beberapa masalah, yaitu :

1. Seberapa jauh pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat pada masyarakat Islam di Kabupaten Demak
 - a. Perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam Hukum Waris Adat setelah bersinggungan dengan Hukum Waris Islam, pada masyarakat Islam di Kabupaten Demak?
 - b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Hukum Waris Adat pada masyarakat Islam di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh Hukum Waris Islam terhadap pelaksanaan Hukum Waris Adat pada masyarakat Islam di Kabupaten Demak.
 - a. Untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam Hukum Waris Adat setelah bersinggungan dengan Hukum Waris Islam pada masyarakat Islam di Kabupaten Demak.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Hukum Waris Adat pada masyarakat Islam di Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan Hukum Waris sehingga akan lebih dipahami hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Waris.
- b. Bermanfaat dalam menuju unifikasi hukum, karena dengan adanya penelitian-penelitian tentang Hukum Waris Adat akan diketemukan asas-asas / prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh masyarakat Islam.

2. Teoritis

Penelitian diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek kewarisan serta memberikan kontribusi dalam rangka penyelesaian waris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam

Di Indonesia dikenal tiga sistim hukum yaitu Sistim Hukum Adat, Sistim Hukum Islam dan Sistim Hukum Barat, sehingga dikenal pula tiga hukum waris yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat.

Hukum Waris merupakan salah satu aspek dari Hukum Perdata, yang sangat erat hubungannya dengan hukum kekeluargaan.

Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas Hukum Waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikan dari pewaris kepada ahli waris. Sehingga pada hakikatnya Hukum Waris Adat adalah penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Proses penerusan dan peralihan itu dapat dimulai sejak pewaris masih hidup dan atau setelah pewaris meninggal dunia. Proses penerusan dan peralihan inilah yang membedakan antara pengertian pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.

Menurut Hukum Adat pewarisan dapat terjadi sebelum dan setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini berkaitan dalam membicarakan masalah pokok yang pertama adalah adanya orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya orang-orang yang menerima waris.

Pewarisan dapat dimulai sebelum pewaris meninggal dunia disebut hibah, *toescheiding* (Ter Haar) dan akan diperhitungkan kelak dikemudian hari, apabila dilakukan pembagian warisan setelah orang tua meninggal dunia. Sedangkan pewarisan yang terjadi setelah orang tua meninggal dunia disebut warisan, *verefen*

(Ter Haar). Oleh karena itu, pengertian pewarisan menurut Djodigono belum tentu merupakan pembagian harta warisan, akan tetapi mungkin pembagiannya harus ditunda, atautah mungkin juga sama sekali tidak diperkenankan untuk dibagi¹⁾. Dengan demikian pwarisan adalah sebuah proses berlangsungnya penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari generasi ke generasi.

Hukum waris disamping mengatur proses pewarisan, juga mengatur ahli waris yang berhak menerima harta warisan, baik yang bersiat materiil maupun immateriil. Harta warisan menurut hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi menurut jenis dan kepentingan para ahli waris.

Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi merupakan milik bersama para ahli waris dan tidak boleh dimiliki secara perorangan, kecuali dengan izin atau musyawarah keluarga. Keadaan seperti itu berkaitan dengan keberadaan jenis dan benda dalam harta warisan yang dibeda-bedakan berdasarkan fungsi dan kedudukannya, seperti harta yang diterima dari nenek moyang yang tidak dapat dimiliki selain secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya secara keseluruhan. Sedangkan harta warisan yang dapat dibagi-bagi merupakan modal dasar kehidupan somahnya. Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam, bahwa harta warisan merupakan satu kesatuan yang dapat dinilai harganya dengan uang dan dapat dipecah-pecah secara matematik.

Dalam hukum adat untuk menentukan berhak atau tidaknya hak mewaris dipengaruhi oleh sistem masyarakat yang dianut. Pada masyarakat yang menganut sistem bilateral (parental) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan pada masyarakat unilateral hanya anak laki-laki saja yang berhak mewaris (patrilineal) atau anak perempuan saja yang berhak mewaris (matrilineal).

¹⁾ Djodigono, Perjodohan dan Pewarisan (Yogyakarta, Borobudur, Tanpa Tahun), hal 31

Namun demikian para ahli waris tidak mempunyai hak mutlak terhadap bagian tertentu terhadap harta warisan karena Hukum Waris Adat disamping menganut dasar persamaan hak, tetapi juga menganut dasar kerukunan dalam pelaksanaan pembagian warisan. Hal ini berbeda dengan Hukum Waris Islam yang mengenal bagian mutlak (tertentu) yang secara tegas diatur dalam Al Qur'an.

Pada masyarakat adat di Indonesia mengenal berbagai macam bentuk kekerabatan dengan sistim keturunan yang berbeda-beda. Sistim kekerabatan yang berhak dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi pada sistem kewarisan dalam Hukum Adat.

Sistem kekerabatan pada masyarakat adat Indonesia ada tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita dalam pewarisan, misalnya di daerah Batak.
- b. Sistem Matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada pria dalam pewarisan. Sistem ini dianut pada masyarakat Minangkabau.
- c. Sistem Bilateral (Parental) yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan kedua belah pihak (bapak dan ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Sistem ini banyak dianut masyarakat Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Disamping itu masih ada sistem garis keturunan yang lain yaitu antara sistem garis keturunan patrilineal dan sistem garis keturunan matrilineal terdapat suatu bentuk sistem campuran atau sistem beralih-alih yang disebut "sistem altenerend", misalnya di daerah Rejang.

Hukum waris adat secara umum dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku pada suatu masyarakat yang juga prinsip-prinsip garis

keturunan ini sangat berpengaruh dalam penetapan ahli waris ataupun bagian harta warisan yang ditinggalkan. Hal ini didukung pula oleh pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa “sifat kewarisan dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada harta kekayaan dalam masyarakat itu”.

Sistem kewarisan yang dikenal pada masyarakat Indonesia adalah :

- a. Sistem Kewarisan Individual adalah suatu sistem kewarisan di mana setiap ahli waris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing.

Sistem kewarisan ini pada umumnya berlaku pada kalangan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental, misalnya terdapat pada masyarakat Jawa. Kebaikan sistem kewarisan individual ini antara lain, dengan pemilikan secara individu maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki bagian harta kewarisannya, untuk dipergunakan sebagai modal kehidupan, tanpa dipengaruhi oleh anggota-anggota keluarga yang lain. Sedangkan kelemahan sistem kewarisan ini adalah dapat mengakibatkan pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan. Sehingga dapat menimbulkan hasrat ingin memiliki secara pribadi, serta mengutamakan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu sistem kewarisan individual dapat menjurus ke arah sifat individualisme dan materialisme.

- b. Sistem Kewarisan Kolektif adalah sistem kewarisan dimana pewaris memberikan harta kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak dibagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk menggunakan harta warisan itu.

Sistem warisan ini terdapat pada masyarakat Minangkabau dan Minahasa.

Sistem kewarisan kolektif ini mempunyai fungsi yang besar karena harta warisan itu diperuntukkan bagi kelangsungan hidup keluarga besar pada masa

sekarang maupun masa mendatang, dalam hal tolong-menolong antara sesama anggota di bawah pimpinan kepala kerabat. Kelemahan sistem kewarisan kolektif ini adalah turut campurnya anggota keluarga lain dalam hal penggunaan harta warisan.

- c. Sistem Kewarisan Mayorat adalah sistem kewarisan yang berupa penerusan dan pengoperan hak penguasaan atas harta yang tidak dibagi-bagi kepada anak tertua.

Kelemahan sistem kewarisan mayorat terletak pada kemampuan anak tertua yang menerima pelimpahan hak penguasaan itu. Apabila anak tertua itu mampu dan penuh tanggung jawab, maka akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga. Akan tetapi sebaliknya, apabila tidak maka yang terjadi adalah perselisihan bahkan mungkin pula mengakibatkan perpecahan keluarga.

Dalam perkembangannya ke tiga sistem kewarisan tersebut, mengalami perubahan-perubahan yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yaitu menuju suatu sistem kewarisan yang dapat diterima semua masyarakat adat Indonesia, dengan berpangkal pada asas dan kaidah Hukum Adat serta Hukum Agama, dalam hal ini Hukum Islam.

Dengan menunjuk pada ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang mengatakan bahwa dalam menyempurnakan undang-undang perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor adat dan agama, maka kompleksitas berlakunya hukum Islam di Indonesia memerlukan suatu aturan konkrit sebagai upaya pemenuhan kearah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum Islam. Atas dasar itu maka dibentuklah kompilasi hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yakni tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan.

Hukum Waris Adat disamping menganut dasar persamaan hak, juga menganut dasar kerukunan dalam pelaksanaan pembagian warisan. Hal ini

berbeda dengan Hukum Waris Islam yang mengenal bagian mutlak (tertentu) yang secara tegas diatur dalam Al Qur'an Surah An'Nissa. Bertitik tolak pada hakikat fungsi harta warisan yaitu sebagai dasar materiil kehidupan somah bagi keluarga dan turunannya, maka Hukum Waris Adat mengenal pula "Lembaga Penggantian Waris". Lembaga Penggantian Waris adalah suatu lembaga, apabila seorang anak meninggal dunia mendahului pewaris (orangtua) dan anak tersebut mempunyai keturunan, maka anak dari yang meninggal dunia itu berhak mengganti kedudukan orang tuanya untuk mendapatkan bagian dari harta warisan kakeknya. Lembaga Penggantian Waris ini tidak dikenal dalam Hukum Waris Islam, oleh karenanya dalam hal pewarisan bukan hanya sekedar peralihan dan pengoperan hak serta kewajiban yang diberlakukan secara berkesinambungan. Sehingga para ahli waris tidak hanya menerima dan mengambil alih hak-hak pewaris melainkan juga untuk meneruskan dan mengambil alih kewajiban-kewajiban pewaris, misalnya hutang-hutang pewaris dan sebagainya.

Seperti telah tersebut di atas, garis-garis hukum kewarisan Islam secara umum telah ditentukan secara tegas dalam Al Qur'an, maka rumusan kompilasi yang mengatur mengenai perkara-perkara di bidang hukum kewarisan yaitu kompilasi Hukum Islam hanya mengikuti rumusan yang terdapat dalam Al Qur'an

Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah Hukum Islam yang disusun secara sistematis terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal. Hukum Kewarisan dalam buku II terdiri 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan pasal 214).

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 kompilasi Hukum Islam telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang

memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah pada ketiga bidang hukum tersebut di atas.

Hukum Kewarisan menurut pasal 171 huruf a kompiasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah), pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dengan demikian sistem kewarisan Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dengan pembagian tertentu. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan maka harta tersebut harus dibagi-bagikan kepada ahli waris yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Menurut Hazairin sistem kewarisan ini disebut sistem individual bilateral. Hal ini juga diatur secara tegas dalam Al Qur'an Surah IV (An Nissa) ayat 7 – 8, ayat 33 dan ayat 11.

Surat An Nissa ayat 7 – 8 berbunyi:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Surat An Nissa ayat 33 berbunyi:

Bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya

Surat An Nissa ayat 11 berbunyi:

Semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orangtuanya.

Dengan demikian Al Qur'an tidak cenderung ke arah masyarakat berklan (unilateral), tetapi cenderung pada masyarakat bilateral. Hal ini dapat pula dilihat dalam Al Qur'an bahwa tidak adanya larangan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang bapaknya atau ibunya masing-masing bersaudara (indogami). Jadi dengan membolehkan perkawinan indogami, yang dilarang dalam masyarakat matrilineal dan patrilineal, maka disimpulkan AlQuran cenderung pada masyarakat bilateral.

Jika dibandingkan antara sistem kewarisan bilateral (Hukum Adat) dengan sistem kewarisan individual bilateral (Al Qur'an) adalah:

1. Menurut sistem kewarisan bilateral kedudukan orang tua pewaris sebagai ahli waris, apabila pewaris tidak mempunyai anak. Sedangkan sistem kewarisan individual bilateral, bahwa anak si pewaris dapat tampil bersama-sama dengan orang tua pewaris sebagai ahli waris (An Nissa ayat 11)
2. Sistem kewarisan bilateral mengenal bahwa saudara-saudara pewaris tertutup sebagai ahli waris, apabila masih ada orang tua pewaris. Sedangkan sistem kewarisan individual bilateral, bahwa saudara-saudara pewaris dapat tampil bersama-sama dengan orang tua pewaris setidaknya ibunya (An Nissa. ayat 12 dan 176)
3. Sistem kewarisan bilateral mengenal asas kesamaan bagi setiap ahli waris. Sedangkan sistem kewarisan individual bilateral hanya mengenal bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu (fara'id)

B. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam

Untuk mengetahui hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam, perlu diketahui latar belakang masuk dan berkembangnya Hukum Islam di Indonesia. Dari penelitian sejarah dapat diketahui bahwa perkembangan Hukum Islam di Indonesia dimulai sekitar abad XV. Mengenai masuknya agama Islam di

Indonesia, ada yang berpendapat berasal dari Arab, namun pada umumnya mengatakan bahwa Islam masuk bukan dari pusatnya di Timur Tengah, tetapi melalui India (Husein Djajadiningrat)²⁾. Sehingga paham mistis yang ada di India berpengaruh pula terhadap Islam yang datang tersebut.

Sedangkan di lain pihak juga mengatakan bahwa agama Islam itu masuk di Indonesia berintegrasi dengan paham-paham bersifat magis yang sudah dikenal bangsa Indonesia dan sehingga berpengaruh pula dalam penyebarannya.

Berdasarkan adanya campuran mistik atau magis ini, nampaknya agama Islam di Indonesia lebih menonjolkan aspek mistik daripada aspek hukum sebagai corak aslinya. Hal ini mengingat peranan mistik asli pada umumnya sebelum Islam dan ajaran yang berasal dari Hindu-Budha sangat besar pengaruhnya. Oleh karena itu dengan warna Islam yang bercorak mistik ini lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Sehingga para penyebar agama Islam seperti para wali (Wali Songo) di Jawa menggunakan media komunikatif rakyat, misalnya wayang yang digunakan sebagai media dakwah dan akhirnya berakibat menimbulkan efek yang sifatnya melestarikan nilai-nilai tradisional sebelum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, C.Snouck Hurgonje berpendapat bahwa sekitar abad XIX Islam masih bercampur dengan peradaban Hindu yang membawa agama Islam ke Indonesia dari India. Sehingga dengan mudah dapat menyesuaikan diri dengan agama Hindu campuran yang ada di Jawa dan Sumatera.

Pandangan tersebut yang membawa C. Snouck Hurgonje mengemukakan suatu jalan pikiran yang berlawanan sekali, yang disebut **theori receptie**. Menurut **theorie receptie** bahwa yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat asli bukan Hukum Islam. Pengaruh hukum agama memang telah masuk dalam Hukum Adat, tetapi pengaruh itu mempunyai kekuatan apabila hukum agama itu telah diterima

²⁾ Husein Djojodiningrat, *Islam di Indonesia* (PT Pembangunan, Jakarta, 1963) hal 75

ke dalam Hukum Adat dan telah menjadi Hukum Adat setempat. Dengan mendasarkan pada *theorie receptie*, maka pengaruh Hukum Islam baru akan mempunyai kekuatan apabila dikehendaki dan diterima oleh Hukum Adat tersebut.

Theorie receptie merupakan teori yang mengcounter (menentang) *theorie receptio in complexu* dari Van Den Berg yang mengemukakan bahwa selama tidak dibuktikan kebalikannya, hukum orang-orang pribumi mengikuti agamanya walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Dengan demikian Hukum Adat terdiri dari hukum agama dan penyimpangan-penyimpangan, sehingga berdasarkan teori tersebut Van Den Berg mengatakan bahwa adat suatu masyarakat adalah resensi seluruhnya dari agama yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Teori ini menjelaskan bahwa apabila suatu masyarakat telah memeluk agama Islam, maka adat istiadat dan hukum yang baik itu adalah Hukum Islam³⁾.

Sebenarnya Hukum Islam yang berlaku bagi penduduk asli bangsa Indonesia telah ada sebelum tahun 1855 itu kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya "Regerings Reglement" (R.R.) tahun 1855, yang dimuat dalam staatsblad 1854 Nomor 129 Staatsblad 1855 Nomor 2. Pasal 75 ayat 3 R.R. berbunyi: Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diperlakukan undang-undang agama (*godsdiens-stige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Bahkan dalam pasal 78 R.R. ayat 2 berbunyi:

Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu, atau mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) atau ketentuan-ketentuan lama mereka.

Dengan demikian bahwa Pemerintah Hindia Belanda dengan melalui peraturan perundang-undangan tertulis secara tegas mengakui bahwa undang-undang Islam (Hukum Islam) berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam.

Namun terlepas dari perbedaan pandangan bahwa, yang berlaku di Indonesia itu Hukum Adat dipengaruhi oleh hukum agama (**Theorie Receptie**), tetapi kenyataan bahwa nilai-nilai tradisional telah banyak mempengaruhi substansi dan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Padahal semula pencerminan nilai-nilai tradisional tersebut diterima hanya sementara waktu saja oleh penyebar agama Islam yaitu sebagai media komunikasi untuk memperlancar proses Islamisasi di Indonesia. Akan tetapi justru menunjukkan sebaliknya yaitu terjadinya dominasi nilai-nilai tradisional atau setidaknya merupakan konflik yang berkepanjangan.

Hukum Islam dengan sedikit mistik ini, nampaknya masih tetap dominan sampai sekarang khususnya bagi masyarakat yang mengaku Islam, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersimbol "tradisi". Padahal hal tersebut merupakan penyimpangan nilai-nilai Hukum Islam, misalnya penanaman kepala kerbau dalam acara peletakan batu pertama pembangunan gedung, upacara selamatan kematian dan sebagainya. Hal ini nampaknya terdapat adanya semacam dikhotomi dalam masyarakat Islam. Fenomena ini dikemukakan oleh Muhammad Ali As Shabun, bahwa di kalangan masyarakat Islam Jawa diklasifikasikan menjadi golongan Islam santri dan golongan Islam abangan⁴⁾

Pada tahun 1925 terjadi perubahan Regerings Reglement menjadi Indische Staatsregeling (Staatsblad 1925 Nomor 415). Pergantian tersebut menyangkut masalah perubahan dan penambahan pasal-pasal baru. Namun pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah Hukum Adat dan Hukum Islam isinya tetap sama, yaitu pasal 75 R.R. menjadi pasal 131 I.S. dan pasal 78 menjadi pasal 134 I.S.

Perubahan yang berikutnya terjadi tahun 1929 yang merupakan perubahan yang sangat mempengaruhi kedudukan Hukum Islam dalam tata Hindia Belanda.

³⁾ Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia* (Jakarta, Djambatan, 1981) hal 36

Dalam perubahan yang terakhir ini adalah untuk mencabut Hukum Islam dari lingkungan tata hukum hindia Belanda yaitu pasal 134 ayat 2 yang baru (I.S. 1929 Nomor 221) yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordinansi.

Dengan adanya pasal tersebut, Hukum Islam berlaku (digunakan) di Indonesia, apabila Hukum Adat menghendakinya. Sehingga pasal 134 ayat 2 I. S. 1929 inilah yang menjadi sumber formal *theorie receptie*.

Sejak saat 1929, masyarakat Indonesia merasakan bahwa pengaruh *theorie receptie* sangat kuat, sehingga Hukum Islam bukan Hukum Indonesia dan yang berlaku adalah Hukum Adat. Sedangkan Hukum Islam baru akan menjadi hukum apabila diterima menjadi Hukum Adat.

Theorie receptie ini diperkenalkan oleh Snouck Hurgonje, kemudian dipertajam oleh Cornelis van Vollenhoven merupakan kritik secara tajam terhadap *theorie receptie in complexu*.

Kebutuhan *theorie receptie in complexu* maupun *theorie receptie*, kenyataan di dalam masyarakat nampaknya masih adanya silang pendapat. Di satu pihak mengatakan bahwa *theorie receptio in complexu* lebih mendekati kenyataan karena hukum agama akan berlaku bagi mereka yang memeluk agama yang dianutnya. Hal ini terlihat bagi mereka yang beragama Islam dalam melaksanakan perkawinan, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang ditentukan Hukum Islam. Demikian juga mereka yang beragama yang beragama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Pelaksanaan perkawinan tersebut secara yuridis formal telah diakui dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal

⁴⁾ Muhammad Ali As Shabun, Hukum Waris dalam Syariat Islam (Bandung, Cetakan Pertama, Diponegoro, 1989), hal 47

2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), terutama yang berkaitan dengan ijab qabul.

Sedangkan di pihak lain, pendukung *theorie receptie* yaitu C. Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah Hukum Adat bukan hukum agama, sebab hukum agama merupakan hukum pendatang (asing) yang masuk ke Indonesia. Memang diakui bahwa pengaruh hukum pendatang ini begitu besar bagi Hukum Adat. Sehingga hukum asli (adat) merupakan bagian pokok dan hukum agama hanya sebagai tambahan-tambahan saja di dalamnya⁵⁾. Hal ini tampak pula banyak istilah dari pendatang (agama) tersebut dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Namun berlakunya hukum agama tersebut diibaratkan sama dengan pemakaian istilah hukum barat dalam dunia perdagangan. Pemakaian atau penerimaan sistem hukum barat atau hukum agama bukan berarti menghapus sama sekali sistem Hukum Adat. Sehingga dengan diterimanya lembaga-lembaga dari sistem hukum asing (agama atau barat) maka yang muncul di permukaan adalah Hukum Adat modern bukan hukum barat atau hukum agama yang diberi baju Indonesia.

Theorie receptie banyak mendapat tantangan dari pemikir-pemikir Hukum Islam di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa teori yang dikemukakan oleh Snouck Hurgonje dan C. Van Vollenhoven tersebut mempunyai maksud politik untuk menghapuskan Hukum Islam dari Indonesia, dengan cara mempengaruhi sistem pendidikan, yaitu menciptakan sekatan-sekatan. Sekatan-sekatan itu diciptakan terhadap suku-suku beragama Islam (Aceh, Sumatera Timur dan Barat) dengan memasukkan sedikit demi sedikit kebudayaan barat dengan politiknya yang dikenal dengan "politik sopan" (etis politik)

Kritik terhadap teori resepsi antara lain dikemukakan. Hazairin yang merupakan salah satu murid Ter Haar menyatakan bahwa teori resepsi yang

diciptakan Belanda untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia itu adalah teori Iblis, karena mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul dengan dalih Hukum Adat tidak melarang.

C. Proses Pewarisan dan Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat

Proses pewarisan adalah merupakan suatu cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan kepada para ahli waris pada waktu pewaris masih hidup dan bagaimana cara pewarisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaian serta bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Proses pewarisan yang berlangsung pada waktu masih hidup dapat berupa penerusan atau pengalihan, penunjukkan atau berupa pesan, wasiat (weling-jawa). Proses pewarisan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia dilakukan oleh janda atau anak tertentu (anak tertua) atau anggota keluarga yang lain. Sedangkan mengenai cara pembagian dapat berupa penangguhan pembagian (Jawa-gantungan) atau pembagian dilakukan dengan cara berimbang atau berbanding seperti Hukum Islam.

a. Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia.

1) Penerusan atau peralihan harta warisan

Masalah penerusan atau peralihan dalam proses pewarisan merupakan peralihan penguasaan dan kepemilikan pada saat dinyatakan oleh pewaris. Proses penerusan atau peralihan biasanya berkaitan dengan masalah kedudukan, hak dan kewajiban serta harta kekayaan yang tidak dibagi-bagi dari pewaris kepada ahli waris, misalnya kepada anak laki-laki dan perempuan tertua di masyarakat Jawa; Hal mana kesemuanya itu sudah berlaku secara tradisional dan pelaksanaannya berdasarkan musyawarah

⁵⁾ Opcit, hal 21

adat dan mufakat kekeluargaan (Hilman Hadikusuma, 1989:96)⁶⁾. Sehingga proses penerusan dan peralihan dapat digambarkan bilaman laki-laki yang mentas (berumah tangga) akan diberikan rumah, perhiasan ataupun alat rumah tangga. Oleh karena itu proses penerusan dan pealihan barang harta kekayaan suatu keluarga di masyarakat dedsa merupakan typisch bagi masyarakat tradisional di Jawa (Soepomo, 1981:86)⁷⁾.

Dengan demikian bahwa proses penerusan dan peralihan harta warisan terjadi pada waktu masih hidup. Proses ini pada umumnya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual (masyarakat bilateral) dan frekuensinya tergantung kepentingan dari masing-masing pihak. Sedangkan di Bali, pemberian harta pada saat pewaris masih hidup tidak dengan sendirinya merupakan pengalihan harta warisan. Pemberian harta tersebut kepada ahli waris semasa pewaris masih hidup berupa "jiwa dana" yaitu pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris dan pengupah jiwa hanya bersifat menikmati hasilnya harta warisan.

2) Penunjukkan

Penunjukkan dalam proses pewarisan itu berarti bahwa penguasaan dan pemilikan harta warisan belum beralih setelah pewaris meninggal dunia. Sebelum pewaris meninggal dunia, harta warisan tersebut masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh pewaris. Sedangkan ahli waris hanya mendapat penunjukkan atas harta warisan tertentu dari pewaris belum mendapatkan sesuatu (harta warisan), selain hak pakai dan hak menikmati hasilnya.

Penunjukkan tidak saja untuk barang bergerak tetapi juga untuk barang tetap seperti sawah, kebun yang disebut "garisan" (Hilman

⁶⁾ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung, cetakan ketiga, Alumni, 1989), hal 96

⁷⁾ Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Jakarta, Cetakan Keenam, Pradnya Paramita, 1981), hal 8

Hadikusuma, 1989:98)⁸⁾. Garisan artinya pewaris menunjukkan garis batas tanah yang diperuntukkan bagi ahli waris. Pelaksanaan penerusan maupun penunjukkan oleh pewaris kepada ahli waris tidak mesti dinyatakan dengan terang dihadapan pemuka desa tetapi pada umumnya hanya dilakukan di hadapan para ahli waris dan anggota keluarga yang lain.

3) Pesan atau wasiat

Pesan atau wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta semasa hidupnya untuk menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris dan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Keinginan terakhir ini biasanya diucapkan pada waktu si pewaris dalam keadaan sakit keras yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya lagi atau diucapkan ketika pewaris akan bepergian jauh, misalnya: naik haji.

Pesan (Jawa-weling, Minangkabau-umanat, Jawa Barat-wekasan) itu baru berlaku, setelah pewaris tidak kembali lagi atau meninggal dunia. Namun jika pewaris masih hidup dan kembali ke kampung halaman maka ia tetap berhak untuk merubah atau mencabut pesannya itu (Hilman Hadikusuma, 1989:99). Pencabutan pesan biasanya dikaitkan dengan tindakan-tindakan a susila dari penerima pesan tersebut.

Pesan atau wasiat dari orang tua kepada ahli waris biasanya harus diucapkan dengan terang dan disaksikan ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan pamong desa. Perbuatan pesan ini harus "terang" agar mendapat perlindungan dalam lalu lintas hukum di luar lingkungan kerabat (Ter Haar, 1983:239)⁹⁾. Menurut Hukum Adat yang dapat menerima pesan

⁸⁾ Opcit, hal 98

⁹⁾ Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Jakarta, Cetakan ketujuh, Pradnya Paramita, 1983), hal 239

adalah ahli waris. Soepomo mengemukakan bahwa "Pewarisan atau hibah wasiat hanya merupakan perpindahan (*verschuiving*) harta benda di dalam lingkungan ahli waris" (Soepomo, 1981:90)¹⁰⁾. Prinsip tersebut berkaitan dengan tujuan hibah yaitu:

1. Memberikan pernyataan mengikat terhadap sifat-sifat dari barang-barang yang akan menjadi harta peninggalan seperti harta asal, warisan, harta yang diperoleh sendiri dan sebagian
2. Mewajibkan para ahli waris untuk membagi0bagi harta peninggalan secara layak menurut anggapan pewaris dan untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam mambagi harta peninggalan dikemudian hari.

Penuangan wasiat ke dalam bentuk testament mulai menjadi kebiasaan di kalangan rakyat yan berstatus sosial baik. Testament sebagai lembaga baru maka pengintegrasianya ke dalam Hukum Adat merupakan suatu jalan pembentukan hukum yang disesuaikan dengan Hukum Adat.

b. Pembagian harta warisan sesudah pewaris meninggal dunia

Apabila seseorang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan maka masalah yang timbul adalah apakah harta itu akan dibagikan kepada ahli waris ataukah tidak akan dibagi-bagikan. Jika harta itu tidak dibagi-bagi, siapa yang akan menguasai dan memiliki harta warisan itu dan jika harta itu dibagi-bagi, siapa yang akan mendapatkan bagian serta bagaimana pembagian itu dilaksanakan.

1) Harta warisan yang tidak dibagi-bagi

Penguasaan harta peninggalan tidak dibagi-bagi karena harta itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditangguhkan disebabkan

¹⁰⁾ Loc cit, hal 90 (Soepomo)

alasan-alasan tertentu antara lain: masih ada orang tua, ahli waris belum dewasa, pewaris tidak mempunyai keturunan, atau terbatasnya jumlah harta peninggalan

Harta warisan yang tidak dibagi-bagi atau ditangguhkan pembagiannya, biasanya dikuasai oleh janda, anak (tertua), anggota keluarga lainnya dan tua-tua adat¹¹⁾. Bagi yang menguasai harta warisan itu, bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan harta tersebut, baik berupa hutang maupun piutang serta pewaris untuk kelangsungan hidupnya.

Pada masyarakat bilateral, janda dapat menguasai harta warisan suami selama hidupnya atau mengalihkan kepada anak-anak setelah dewasa atau berumah tangga. Bahkan kadang-kadang janda berperan sebagai pembagi harta warisan kepada anak-anaknya tanpa ada campur tangan orang lain. Sedangkan apabila janda tidak mempunyai anak, janda dapat menguasai harta warisan sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia (Keputusan M.A. No, 298 K/Sip/1958, tanggal 29 Oktober 1958).

Pada masyarakat patrilineal, yang menganut sistem perkawinan jujur maka isteri masuk anggota kekerabatan suami dan janda tetap dapat menguasai serta menikmati warisan selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya. Namun apabila janda tidak mempunyai keturunan, ia dapat kawin lagi dengan saudara laki-laki suami atau dengan orang lain yang ditunjuk oleh kerabat sebagai pengganti suami untuk mendapatkan keturunan. Keturunan pada sistem masyarakat patrilineal merupakan hal yang asasi karena sebagai penerus kekerabatan. Penguasaan harta warisan oleh janda akan berakhir apabila anak-anaknya sudah dewasa dan berumah tangga.

Pada masyarakat matrilineal, janda adalah mutlak menjadi pemilik atas harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi untuk kepentingan anak-anaknya. Pengelolaan harta ini dibantu dan diawasi oleh saudara laki-laki tertua si janda yang disebut “Mamak Kepala Waris”.

2) Harta peninggalan yang dibagi-bagi

Apabila seseorang meninggal dunia, maka persoalannya adalah bagaimana harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris. Jika harta tersebut akan dibagikan, kapan dan bagaimana cara pembagian itu dilaksanakan.

Hukum Adat tidak menentukan kapan pembagian harta warisan itu dilakukan dan siapa yang menjadi juru baginya. Pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia biasanya dilakukan setelah selamatan meninggalnya pewaris, misalnya: empat puluh hari, seratus hari dan seribu hari.

Mengenai juru bagi, pada umumnya pertama-tama dilakukan dalam lingkungan kerabat sendiri yaitu janda, anak tertua atau anggota keluarga lainnya (saudara pewaris). Akan tetapi kadang-kadang dengan bantuan orang luar misalnya pemuka masyarakat, pemuka agama atau kepala desa. Campur tangan orang luar baru diperlukan, apabila dalam pembagian harta warisan itu tidak terjadi kesepakatan. Dengan kata lain selama proses pembagian harta itu berjalan secara rukun dan damai (lancar) maka campur tangan orang luar tidak diperlukan atau apabila ada, hanya bertindak sebagai saksi.

Hukum Adat juga tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan secara matematis, tetapi pembagian yang berdasarkan atas perimbangan karena mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris

¹¹⁾ Hilman Hadikusuma, *Loc cit*, hal 100

yang bersangkutan. Jadi walaupun Hukum Adat mengenal asas persamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sama, nilai harga sama, atau menurut bagian yang sudah ditentukan. Di kalangan masyarakat tertentu pada masyarakat Jawa dijumpai beberapa kemungkinan cara pembagian harta warisan yaitu:

1. Segendong sepikul artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan
2. Dum-dum kupat artinya bagian anak laki-laki dan anak perempuan berimbang sama.

Dengan demikian cara pembagian harta peninggalan dilakukan berdasarkan asas kesamaan dan kesebandingan berdasarkan perkiraan bukan perhitungan angka.

c. Prinsip Dasar Pembagian Harta Warisan

1) Subyek hukum waris

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. mereka itu adalah seseorang atau beberapa orang yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si pewaris yaitu anak yang merupakan ahli waris utama. Dengan adanya anak maka anggota keluarga yang lain tertutup tidak akan menjadi ahli waris apabila si pewaris mempunyai anak.

Namun karena pengaruh agama atau hubungan kekerabatan, orang yang semula bukan ahli waris utama dimasukkan dalam kelompok ahli

waris utama. Sehingga berhak atau tidaknya menjadi ahli dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan juga dipengaruhi agama.

Apabila ahli waris kelompok utama tidak ada, maka kedudukannya diganti oleh ahli waris kelompok lain. Pengelompokan ahli waris itu berturut-turut akan tampil sebagai ahli waris utama, apabila ahli waris kelompok utama tidak ada. Pengelompokan ini adalah garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.

Garis pokok keutamaan ini merupakan garis hukum yang menentukan urutan-urutan diantara golongan atau kelompok dalam keluarga pewaris dengan pengertian golongan satu atau lebih diutamakan dari golongan yang lain. Garis pokok penggantian merupakan garis hukum yang menentukan siapakah di antara orang-orang dalam golongan keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris.

Dengan menggunakan garis pokok keutamaan ini, maka ahli waris dikelompokkan menjadi beberapa golongan yaitu:

1. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris (anak) atau keturunannya.
2. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
3. Kelompok keutamaan III : saudara pewaris atau keturunannya
4. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris atau keturunannya

Dalam menentukan ahli waris dengan menggunakan prinsip garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian, maka yang diperhatikan adalah prinsip-prinsip garis keturunan yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Ahli waris utama dalam masyarakat bilateral adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan). Di masyarakat bilateral (Jawa), anak

laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak sama atas harta warisan orang tuanya. Hal ini tidak berarti bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka, akan tetapi pembagian itu didasarkan kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan (kondisi) dari masing-masing ahli waris.

Anak kandung (laki-laki atau perempuan) adalah merupakan generasi penerus dari orang tuanya. Oleh karena itu harta warisan dalam bentuk apapun akan diteruskan pada anak kandung yang pada gilirannya sebagai barang asal. Hal ini sesuai dengan falsafah perkawinan bangsa Indonesia yaitu bahwa salah satu tujuan okok perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan (anak), agar dapat menjadi penerus hidupnya.

Dengan mendasarkan persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan maka seyogyanya bagian warisan masing-masing adalah sama besar (satu dibanding satu). Sehingga Mahkamah Agung melalui Keputusan No. 179 K/Sip/1961 menetapkan: bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Kedudukan janda pada masyarakat bilateral menempati posisi yang tidak kalah pentingnya dalam Hukum Waris Adat. Janda pada dasarnya adalah bukan ahli waris, walaupun demikian janda mempunyai sejumlah hak yang memberikan kedudukan kuat menurut Hukum Waris Adat yaitu berhak mendapatkan bagian harta warisan suami bersama-sama dengan ahli waris lainnya serta berhak menahan pembagian harta warisan. Di samping itu, apabila dalam perkawinan tidak mendapat keturunan maka janda berhak menguasai dan menikmati harta asal suami, sampai kawin lagi atau meninggal dunia.

Kedudukan janda bukan sebagai ahli waris harta warisan suami, merupakan suatu gambaran bahwa janda adalah orang asing. Walaupun demikian sebagai isteri berhak mendapat manfaat dari harta warisan, apabila harta gono-gini tidak mencukupi untuk dapat hidup yang layak sepanjang ia tidak kawin lagi atau meninggal dunia.

Mengenai kedudukan janda, banyak para sarjana (Ter Haar, Soepomo, Djojodiguno dan Soeripto) mengemukakan bahwa janda bukan ahli waris akan tetapi berhak menikmati harta warisan suaminya baik harta gono-gini maupun harta asal suami. Demikian pula adanya perkembangan kedudukan janda dalam keputusan-keputusan hakim, sebelum proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menetapkan bahwa janda adalah bukan ahli waris (Keputusan Raad van Justitie Batavia tanggal 26 Mei 1939, T. 153-148 tanggal 17 Nopember 1939).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat Keputusan Mahkamah Agung No. 387 K/Sip/1958 yang isinya: bahwa janda berhak mendapat separo harta gono-gini. Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung tersebut berarti telah terjadi perkembangan kedudukan janda, yang semula janda hanya berhak menikmati, kemudian menjadi memiliki harta warisan suaminya.

Kedudukan janda sebagai ahli waris baru secara tegas diakui legalitasnya pada tahun 1960, yaitu setelah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung No. 110 K/Sip/1960, tanggal 20 April 1960 yang menetapkan bahwa: menurut Hukum Adat seorang janda adalah ahli waris almarhum suaminya (dalam Soebekti R., Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung). Dengan mendasarkan keputusan tersebut, maka Mahkamah Agung tidak lagi membatasi kriteria ahli waris yang didasarkan persamaan darah atau keturunan melainkan juga

didasarkan hubungan perkawinan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa dalam suatu perkawinan hubungan lahir dan batin antara suami dan isteri dapat dikatakan sedemikian eratnyanya; sehingga melebihi seuami dengan para anggota keluarga sedarah. Di samping itu janda ikut merasakan suka dan dukanya kehidupan bersama-sama dengan suami. Berdasarkan kenyataan itu maka dapat dirasakan memenuhi keadilan, apabila janda diberi hak waris atas harta warisan suami bersama-sama dengan anaknya.

2) Anak angkat

Dalam Hukum Waris Adat anak angkat adalah orang luar yang mendapat perlakuan istimewa dan mendapat pula bagian warisan. Perlakuan istimewa ini karena begitu besar peranannya dalam rumah tangga tersebut. Dalam Hukum Islam, kedudukan anak angkat tetap diletakkan di luar ahli waris, namun dengan mengadaptasi nilai Hukum Adat secara terbatas ke dalam nilai Hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan putusan pengadilan, seperti yang disebutkan dalam huruf h pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta warisan orang tua angkatnya”. Demikian disebutkan dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi

Pengangkatan anak di beberapa daerah lingkungan Hukum Adat Indonesia ternyata tidak sama. Sehingga berakibat pula pada perbedaan kedudukan anak angkat tersebut.

Pengangkatan anak di masyarakat bilateral, pada umumnya adalah bukan ahli waris sebab anak angkat tidak mempunyai hubungan darah

dengan orang tua angkatnya namun diperlakukan sebagai anaknya, sehingga kelak di kemudian hari diharapkan dapat memelihara dan meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak di Jawa misalnya, tidak memutuskan hubungan pertalian keluarga anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Proses pengangkatan anak pada masyarakat bilateral Jawa berbeda dengan masyarakat unilateral, yaitu hanya sekedar selamatan untuk penyaksian pengangkatan anak dan dihadiri oleh keluarga dekat dan pemuka masyarakat atau kepala desa. Sehingga pengangkatan anak di Jawa lebih bersifat sosial dan psikologis daripada bersifat yuridis¹²⁾.

Mengenai kedudukan anak angkat dalam harta warisan orang tua angkatnya, pada umumnya para sarjana memandang bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris dalam arti seperti anak kandung. Hal ini dikemukakan antara lain oleh Ter Haar, Soepomo, Dojodigono dan Iman Sudiyat mengemukakan bahwa, anak angkat bukan ahli waris yang berstatus seperti anak kandung tetapi hanya berhak mendapat bagian harta bersama orang tua angkat, sedangkan harta asal tetap kembali ke asal dan berhak pula harta warisan orang tua kandungnya.

Anak angkat diibaratkan minum "sumur loro" (dua sumber) artinya anak angkat berhak menerima bagian harta bersama orang tua angkat tetapi juga masih mendapat warisan dari orang tua kandungnya karena kedudukan dengan orang tua kandungnya tidak terputus¹³⁾.

3) Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Pengertian ahli waris menurut Hukum Islam adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang

¹²⁾ Ibid, hal 122

meninggal dunia. Sedangkan yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

Ahli waris Islam dapat dibedakan golongan asobat dan bukan asobat. Golongan asobat adalah semua kerabat laki-laki. Bukan golongan asobat adalah kaum kerabat wanita yang dimasukkan sebagai ahli waris oleh Al Qur'an. Ahli waris yang termasuk asobat adalah:

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) terus ke bawah
3. Bapak dari pewaris
4. Bapak dari bapak terus ke atas yang laki-laki
5. Saudara laki-laki seibu dan seapak atau seapak saja atau seibu saja
6. Anak laki-laki dari saudara seibu-seapak atau seapak saja
7. Anak laki-laki dari saudara bapak (paman) yang seibu seapak atau seapak saja
8. Suami (dari pewaris)
9. Laki-laki yang memerdekakan pewaris

Namun apabila ahli waris golongan asobat itu semuanya ada, maka yang berhak mendapat harta warisan adalah hanya bapak, anak laki-laki dan suami. Ahli waris yang termasuk bukan golongan asobat adalah:

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah menurut garis laki-laki
3. Ibu dan ibu dari bapak (nenek)
4. Ibu dari ibu terus ke atas
5. Saudara perempuan seibu-seapak atau seapak atau seibu saja

¹³⁾ Djojodiguno, Locit, hal 53

6. Isteri

7. Perempuan yang memerdekakan pewaris.

Apabila ahli waris yang bukan golongan asobat ini ada semua maka yang berhak mendapat harta warisan adalah hanya isteri, anak perempuan, anak perempuan dari laki-laki, ibu dan saudara wanita seibu seapak. Kemudian apabila kedua golongan ahli waris itu (asobat dan bukan asobat) itu ada semua, maka yang mutlak harus menerima harta warisan adalah: suami atau isteri, ibu dan bapak, anak-laki-laki dan anak perempuan.

Di samping itu Hukum Islam juga menentukan bagian tertentu (menurut Al Qur'an dan Hadits) disebutkan "dzul faraidh" dan ada pula yang mendapat bagian sisa yang disebut "dzul qarabat". Bagian tertentu dari harta warisan (dzul faraidh) adalah seperdua ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$) dan seperenam ($\frac{1}{6}$). Hal tersebut diatur dalam Al Qur'an, Surat An Nissa ayat 11 dan 12.

Untuk menentukan seseorang mendapat harta warisan (berstatus ahli waris) Hukum Islam menggunakan 3 hal:

- a. Kerabat yang sebenarnya (hubungan darah) adalah mereka yang ada hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia yaitu: orang tua, anak-anak, saudara dan paman.
- b. Hubungan pernikahan adalah mereka-mereka yang ada hubungan perkawinan dengan atau yang meninggal dunia yaitu: suami atau isteri
- c. Al wala adalah kerabat hukumiah, yaitu mereka-mereka (benda-benda) yang oleh orang tuanya diberikan kenikmatan untuk hidup mereka.

Sedangkan seseorang tidak mendapatkan warisan (terhalang) adalah: hamba sahaya, ahli waris yang membunuh pewaris dan orang berlainan agama (Muhammad Ali As Shabuni, 1988:50-53)¹⁴⁾.

Mengenai jumlah bagian yang diterima oleh seseorang anak laki-laki dan anak perempuan tercantum di dalam Surah An Nissa ayat 11 yang berbunyi: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Oleh karena pengaruh ajaran Islam inilah maka dalam sistem kewarisan individual Hukum Adat dikenal istilah pembagian sepikul segendong¹⁵⁾

Sesungguhnya Hukum Waris Islam yang diatur di dalam AlQur'am adalah merupakan hukum waris pembaharuan dari hukum waris adat bangsa Arab. Sistem hukum waris adat Arab menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu yang berhak mendapat harta warisan adalah kaum asobat (kaum kerabat lelaki dari pihak bapak). Oleh karena itu setelah datangnya Islam terjadi perubahan-perubahan, khususnya masalah ahli waris yang tercantum di dalam Surah An Nissa ayat 7 – 18, yang memberikan bagian harta warisan kepada anak perempuan, sehingga disebut "dzawil faraidh" yaitu: ahli waris yang berhak mendapatkan warisan adalah:

- a. Menurut garis bapak-anak (ke baawah) ialah juga anak perempuan, anak perempuan dari laki-laki
- b. Menurut garis anak-bapak (ke atas) ialah bapak kakek dari pihak bapak dan nenek perempuan dari pihak bapak maupun dari pihak ibu

¹⁴⁾ Muhammad Ali As Shabun, Loc cit, hal 50-53

¹⁵⁾ Hilman Hadikusuma, Loc cit, hal 9 -31)

- c. Menurut garis saudara (ke samping) ialah saudara kandung, saudara tiri dari pihak bapak, saudara tiri dari pihak ibu, juga duda dan janda.

Demikian pula pembagian harta warisan yang sebenarnya harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam, karena masalah ini diatur dalam AL Qur'an. Namun kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam melaksanakan pembagian harta warisan menurut Hukum Islam tetapi memakai Hukum Adat.

- d. Kemungkinan hilangnya hak mewaris

Setiap orang pada dasarnya adalah ahli waris dari orang tua kandungnya (pewaris) dan orang tua angkat yang berdasarkan Hukum Adat yang berlaku baginya. Namun demikian ada kalanya seseorang kehilangan hak mewaris dikarenakan perbuatannya yang bertentangan dengan Hukum Adat. Perbuatan salah yang memungkinkan hilangnya hak mewaris seseorang terhadap harta warisan orang tuanya adalah:

- a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris
- b. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris
- c. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela.
- d. Berpindah agama dan kepercayaan dan sebagainya.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dibatalkan, apabila pewaris atau ahli waris lainnya telah memaafkan sebelum atau ketika harta warisan dilakukan pembagian. Pengampunan atas kesalahan oleh ahli waris dapat berlaku pada semua harta warisan atau hanya sebagian saja, misalnya ahli waris tidak diperkenankan mendapat bagian dari harta asal.

D. Pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Adat

Eksistensi Hukum Adat pada masyarakat Islam nampaknya menimbulkan polemik antara kedudukan Hukum Adat dan hukum Islam, di satu oihak menghendaki berlakunya Hukum Islam tanpa melalui Hukum Adat atau langsung sebagai sumber hukum. Namun masyarakat sendiri tidak mempertentangkan antara Hukum Adat dan Hukum Islam bahkan dapat hidup berdampingan dan telah ditentukan pula tempat kedudukanny masing-masing. Hal ini antara lain di Minangkabau telah ada konsensus antara pemuka adat dan pemuka agama yang diadakan di Bukit Marapalam yang disebut "Piagam Bukit Marapalam", yang isinya yaitu: Adat bersendi syara', syara' artinya bersendi kitab Allah; Syara' mengato, adat memakai¹⁶⁾

Dengan konsensus tersebut, adat di rekodifikasi dan posisi agama diperkuat. Dalam kehidupan sehari-hari peraturan adat harus merupakan manifestasi perencanaan agama (Syara' mengato, adat memakai artinya agama menyatakan, adat menetapkan). Sehingga berkat pengaruh ketentun-ketentuan Hukum Islam menyebabkan garis hubungan kekeluargaan bapak dan anak kandung menjadi sangat erat pada masyarakat adat Minangkabau.

Perubahan-perubahan dalam perkembangan tata kehidupan sosial masyarakat adat Minangkabau menunjukkan gejala umum yang memperlihatkan hubungan suami isteri dalam rumah menggeser kehidupan rumah gadang. Dengan demikian perubahan hubungan keluarga suami isteri, bapak anak kandung dalam tata kehidupan masyarakat matrilineal disebabkan pengaruh proses kebangkitan individu dan pengaruh agama. Kehidupan rumah juga membawa perubahan terhadap harta warisan seorang ayah atau suami yang diwariskan kepada anak-anak kandung dan isterinya.

¹⁶⁾ Amir Syarifudin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau (Jakarta, Gunung Agung, Tahun 1984, hal 162

Kedudukan ayah dan ibu sebagai pewaris bagi anak-anaknya terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 7/Pdt/1973 yang isinya: Harta pencaharian seorang ayah diwarisi oleh anak-anaknya dan penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 33/1973 yang isinya: anak kandung perempuan berhak atas harta pencaharian ayahnya, di samping isteri-isteri yang masih ada. Sehingga dengan demikian telah terjadi perubahan atas Hukum Waris Adat yang berlaku yaitu bahwa yang berhak mewaris harta warisan bukan hanya keturunan perempuan saja, tetapi juga dari keturunan laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut setiap ahli waris menerima haknya secara perorangan. Hal ini berarti timbulnya asas individual sebagai variasi dari asas kolektif dalam Hukum Waris Adat. walaupun dari segi kuantitas belum semua mengikuti asas individual. Tetapi telah menunjukkan gejala bahwa sistem kewarisan kolektif menurut Hukum Adat pada masyarakat Minangkabau telah ditinggalkan.¹⁷⁾

Dengan berlakunya asas individual berarti menunjukkan bahwa telah terjadi pengaruh Hukum Islam terhadap Hukum Waris Adat Minangkabau. Namun tampaknya belum sepenuhnya mengikuti Hukum Waris Islam, terutama masalah porsi bagian masing-masing ahli waris. Sebagian mengikuti rincian yang diatur dalam Hukum Waris Islam dan sebagian lagi didasarkan atas perdamaian dan musyawarah.¹⁸⁾

Dengan demikian eksistensi Hukum Adat pada masyarakat matrilineal (Minangkabau) masih tetap ada walaupun telah mengalami perubahan-perubahan. Hal ini nampak pada bentuk keluarga inti (sumah) yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat matrilineal tersebut. Demikian pula menyangkut harta warisan utamanya harta pencaharian yang memberikan arti khusus dan dipisahkan dari

¹⁷⁾ ibid, hal 309

¹⁸⁾ ibid, hal 310

harta pusaka. Begitu pula bentuk kewarisan telah membawa keluar dari lingkungan rumah gadang dan telah berhaknyanya anak-anak atas harta pencaharian ayahnya.

Demikian pula di Aceh masyarakatnya mayoritas Islam dan terkenal dengan sebutan “Serambi Mekah”. Hal ini nampak bahwa pembagian harta warisan di Aceh dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Namun di lain pihak Hukum Adat masih tetap melekat, yaitu adanya pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

Pembagian harta warisan oleh pewaris yang berdasarkan Hukum Adat, kadang-kadang dalam prakteknya tidak secara murni Hukum Adat. Misalnya penentuan golongan ahli waris berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam. Akan tetapi besarnya bagian ahli waris berdasarkan atas putusan pewaris atau atas dasar musyawarah dan mufakat yang berdasarkan konsep Hukum Adat. Sehingga Hukum Adat masih dominan dan banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa warisan dibandingkan Hukum Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensi Hukum Adat pada masyarakat Aceh masih tetap ada bahkan terjadi hubungan yang harmonis tanpa menimbulkan perselisihan dalam pembagian harta warisan.

Dengan demikian kecenderungan Hukum Adat sebagai pilihan utama dalam penyelesaian sengketa warisan selain karena faktor kemudahan dalam penerapannya dan dirasakan memenuhi rasa keadilan, juga secara yuridis historis, Hukum Adat merupakan hukum asli yang secara turun temurun telah mengatur tata kehidupan masyarakat dari nenek moyang sampai generasi sekarang dan mungkin kepada generasi-generasi mendatang. Oleh karena itu Hukum Adat dianggap telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka, sehingga perlu dilestarikan dan akan tetap mampu digunakan sebagai kaidah-kaidah pengtur

tingkah laku serta dihadapkan menjadi kasidah-kaidah pedoman dalam Hukum Waris.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan pembagian harta warisan ada 2 (dua) tipe, adalah: yang terbanyak bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan yaitu 1:1, dan yang kedua bagian laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Sedangkan mengenai anak angkat nampaknya sebagian besar lembaga ini dipengaruhi Hukum Adat dan hanya sebagian kecil saja yang dipengaruhi Hukum Islam. Demikian pula kedudukan janda, janda berhak atas harta gono-gini.¹⁹⁾

Dengan adanya gambaran tersebut, maka pengaruh agama Islam terhadap Hukum Adat sedemikian rupa sehingga terjadi persesuaian antara Hukum Adat dan Hukum Islam. Ketentuan adat yang bertentangan dengan Hukum Islam sudah ditinggalkan oleh masyarakat Islam, sedangkan ketentuan-ketentuan adat yang lain nampaknya masih tetap dilaksanakan. Hukum adat masih diakui atau baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam yang disebut *receptie a contratio*.

Dengan demikian hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam arti telah terjadi kontak antara kedua sistem hukum itu, telah lama berlangsung di Indonesia. Hal ini disebabkan karena prinsip rukun dan kebersamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa.

¹⁹⁾ Djoko Sukismo, Perkembangan Hukum Waris Adat di Kalangan Rakyat Indonesia Asli di Daerah Istimewa Yogyakarta, Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 1989, hal 33)

BAB III

CARA PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai “Pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat pada Masyarakat di Kabupaten Demak” ini merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif artinya hasil penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara menyeluruh, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang Hukum Waris yang berlaku pada masyarakat di Kabupaten Demak. Analitis artinya data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh yang timbul dari Hukum Islam terhadap Hukum Waris Adat pada masyarakat Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat kualitas dari subyek yang diteliti dengan mendeskripsikan atau melukiskan permasalahan-permasalahan yang ada melalui pendekatan yuridis empiris. Yuridis karena penelitian ini berpangkal dari aturan-aturan hukum tertentu yang berarti prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam aturan hukum tertentu tersebut digunakan untuk melihat dan menelaah masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis ini untuk menganalisis aturan hukum yang mempunyai korelasi dengan masalah kewarisan. Empiris karena penelitian dilaksanakan dalam suatu lingkungan social tertentu sebab pelaksanaan hukum tidak dapat lepas dari keadaan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Pendekatan empiris ini lebih mendekatkan pada fenomenologi, artinya penulis

mendeskripsikan tentang apa yang menjadi pokok pembahasan mengenai pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat, melalui data-data dan fakta yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan dengan wawancara oleh para responden dan nara sumber serta data kepustakaan yang berasal dari literatur, yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Hukum Pewarisan. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang menggunakan langkah untuk mengetahui bagaimana suatu aturan hukum tertentu diterapkan dalam suatu lingkungan social tertentu, yaitu dengan melihat serta menelaah permasalahan dengan mengadakan pendekatan secara langsung pada responden atau orang-orang yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

B. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini ditujukan kepada kepala keluarga sebagai unit sampling dalam masyarakat Islam di Kabupaten Demak.

Kabupaten Demak terbagi dalam 14 (empat belas) kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Mranggen
2. Kecamatan Karangawen
3. Kecamatan Guntur
4. Kecamatan Sayung
5. Kecamatan Karangtengah
6. Kecamatan Bonang
7. Kecamatan Demak
8. Kecamatan Wonosalam

9. Kecamatan Dempet
10. Kecamatan Gajah
11. Kecamatan Karanganyar
12. Kecamatan Mijen
13. Kecamatan Wedung
14. Kecamatan Kebon Agung

Penelitian ini menggunakan teknik non random sampling, yaitu tidak semua unsur yang ada dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, kemudian akan diikuti metode purposive sampling, yaitu memilih subyek untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu.

Sebagai lokasi penelitian dipilih secara purposive 5 (lima) kecamatan untuk mewakili 14 (empat belas) kecamatan yang ada, yaitu:

1. Kecamatan Sayung
2. Kecamatan Karangtengah
3. Kecamatan Demak
4. Kecamatan Gajah
5. Kecamatan Wonosalam

Dipilihnya 5 (lima) lokasi tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa di antara lokasi tersebut banyak terdapat pondok pesantren di mana peneliti membandingkan lokasi yang banyak terdapat pondok pesantrennya dan lokasi yang jarang terdapat pondok pesantrennya.

C. Penentuan Subjek Penelitian (Responden dan Narasumber)

Tiap-tiap kecamatan itu diambil 8 (delapan) responden yang terdiri dari 2 (dua) responden yang pernah melakukan pewarisan dan 6 (enam) responden yang pernah menerima harta warisan. Sehingga jumlah responden seluruhnya adalah 40 (empat puluh) orang yaitu 10 (sepuluh) orang untuk responden yang pernah melakukan pewarisan (pewaris) dan 30 (tiga puluh) orang untuk responden yang pernah menerima harta warisan (ahli waris)

Disamping responden tersebut di atas, juga ada beberapa nara sumber yaitu: 3 (tiga) orang pemuka masyarakat, 3 (tiga) orang kyai atau ulama serta pejabat dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui metode wawancara langsung dengan orang yang berkompeten yaitu responden yang pernah menerima dan atau memberi warisan, pemuka masyarakat (camat/ lurah/ kepala desa), kyai atau ulama yang lebih mengetahui masalah dibandingkan masyarakat biasa.

Selain itu digunakan juga kuesioner yang dibagikan kepada responden yang berbentuk kombinasi antara jawaban tertutup dan jawaban terbuka, yang diperuntukkan untuk responden pewaris dan ahli waris yang sulit ditemui langsung oleh peneliti pada siang hari karena bekerja sampai malam.

Kuesioner tersebut berisikan identitas responden yang berisi jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, agama dan jabatan serta

pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai waktu pelaksanaan pewarisan, siapa yang membagi warisan, siapa yang menyelesaikan apabila dimungkinkan ada sengketa cara membagi warisan, bentuk warisan, siapa yang menerima warisan, bagian warisan yang diterima, anak angkat dan wasiat.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara yang berpedoman, artinya peneliti telah mempersiapkan bahan-bahan (pertanyaan) yang akan ditanyakan kepada responden. Pertanyaan berisi proses pewarisan, harta warisan, ahli waris dan penyelesaian apabila dimungkinkan sengketa.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti dengan bantuan kuesioner menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada sebagian responden yang tidak dikunjungi untuk diwawancarai secara langsung. Untuk wawancara langsung dilaksanakan sendiri oleh peneliti pada siang hari. Dari tiap kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian lebih banyak dijumpai mereka yang telah menerima warisan, dibandingkan mereka yang melakukan pewarisan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan jumlah responden yang telah menerima warisan (ahli waris) 3 (tiga) kali jumlah responden yang melakukan pewarisan (pewaris) yaitu 2 (dua) orang responden pewaris dan 6 orang responden ahli waris dari tiap-tiap kecamatan.

Dari hasil wawancara dan kuesioner tersebut dapat diketahui lebih jelas keadaan yang sebenarnya atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran nyata.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis induktif, peneliti menilai dan menganalisa data yang telah difokuskan tentang permasalahan yang ada, secara logis sistematis dengan cara berpikir yang runtut, ajeg dan tidak ada

pertentangan di dalamnya. Sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggung-jawabkan secara rasional sistematis, artinya setiap bagian analisis saling berkaitan satu dengan yang lain atau merupakan kebulatan yang saling terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A1. Pendahuluan

Agama Islam mulai tersebar di Asia Tenggara dan Kepulauan Indonesia diperkirakan sejak abad XII atau abad XIII. Masuknya agama Islam di wilayah Indonesia tidak berlangsung bersamaan dan untuk daerah pantai lebih dahulu dibanding daerah-daerah pedalaman.

Suatu kenyataan bahwa di Sumatera Utara, Aceh dan beberapa kota pelabuhan penting, sejak pertengahan abad XIII sudah menganut agama Islam. Pada abad tersebut hegemoni politik di Jawa masih terletak di tangan raja-raja yang beragama Syiwa dan Budha.

Sehingga besar kemungkinan bahwa pada abad XIII di Jawa sudah ada orang-orang Islam yang menetap, sebab jalan perdagangan di laut yang menyusuri pantai timur Sumatera melalui Laut Jawa ke Indonesia, sudah ditempuh sejak zaman dahulu. Para pelaut, baik yang beragama Islam maupun tidak, dalam perjalanannya mereka singgah di banyak tempat. Pusat-pusat pemukiman di pantai utara Jawa seperti Surabaya, Gresik, Tuban, Demak dan daerah-daerah pantai lainnya, ternyata sangat cocok untuk tempat persinggahan.

Dengan demikian Kabupaten Demak yang merupakan salah satu pantai utara yang ada di wilayah Jawa Tengah sangat potensial sebagai salah satu dari pusat-pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Sehingga di daerah itu terdapat makam para penyebar agama Islam (para wali) seperti Sunan Kalijaga yang terletak di Kadilangu.

A2. Sejarah Singkat Kota Demak

Pada abad ke-15, zaman Kerajaan Majapahit yang diperintah Prabu Brawijaya V yang terkenal sebagai Raden Wijaya, dimana sebagai kerajaan besar Hindu mulai mengalami keruntuhan. Dengan lambat laun pupusnya kekuatan tersebut disaat itulah kerajaan Majapahit yang beraliran Hindu dan selama itu masih sulit disaingi paham baru yang dibawa ulama Islam runtuh secara alamiah, bukan karena serangan langsung dari Raden Patah yang melanjutkan kejayaan Majapahit melalui pola pemerintahan Islam.

Runtuhnya Majapahit secara bertahap merupakan suatu kebetulan bagi Raden Patah untuk mempermudah rencana syiar serta dakwah yang ia tekuni pada seorang gurunya yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Raden Patah adalah anak kandung dari Prabu Brawijaya V yang dititipkan sejak dalam kandungan ibunya kepada saudara Prabu di Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Dalam memberikan keyakinan tentang paham ajaran Islam itu Raden Patah tetap merahasiakan jati dirinya, dengan begitu Raden Patah tidak diizinkan untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyat Majapahit. Baru setelah rahasia itu diutarakan pada Prabu Brawijaya V dan diyakini bahwa Raden Patah memang putra mahkota, maka Prabu Brawijaya tidak membatasi ruang gerak syiar dan merestui langkah-langkah yang diambil Raden Patah. Dalam memihak pasukan Prabu dengan kehebatan dan sepak terjangnya itu, akhirnya Raden Patah dipanggil menghadap Prabu Brawijaya V dengan diberikan sebuah wilayah untuk membangun kekuasaan sendiri. Setelah Majapahit benar-benar runtuh,

Raden Patah memisahkan diri dari kerajaan besar itu dan membangun kerajaan kecil sesuai cita-citanya yang bernapaskan Islam.

Raden Patah dengan bantuan para wali atau alim ulama yang dikenal sebagai wali songo serta sejumlah pengikut setia dari Majapahit yang telah menganut Islam membuka hutan Gelagah Wangi pemberian ayahnya Prabu Brawijaya V sebagai areal kerajaan kecil bernama bintoro Demak. Daerah itu sekarang dikenal dengan sebutan Demak.

Sejak itulah kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai beralih ke Demak, dengan Raden Patah sebagai raja didukung sembilan wali sebagai pusat pemerintahan Islam dan pusat penyebaran agama Islam di seluruh Jawa. Tiap wali tersebut memiliki wilayah dakwah tersendiri secara umum di luar kesultanan Demak. Sedangkan di dalam wilayah Demak tampil Sunan Kalijaga yang bernama Raden Mas Sahid yang terus menyiarkan ajaran Islam sampai puncaknya, dengan sifat kemoderatan yang merupakan dari bangsa Indonesia yang kaya akan budaya yang tidak boleh dihapus dan dilupakan sekalipun menganut ajaran Islam keras, sehingga kharisma Demak sebagai kota pusat dalam bidang kerokhanian sampai kini memiliki arti khusus.

Dengan demikian wajarlah apabila Demak merupakan daerah yang masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam dan dengan sendirinya pula Hukum Islam banyak mempengaruhi tata kehidupan masyarakat Demak.

A3. Tinjauan Umum Kabupaten Demak

a. Letak Geografis

Kabupaten Demak terletak diantara 6^0 sampai dengan 7^0 Lintang Selatan dan 100^0 sampai dengan 111^0 Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Jepara dan Laut Jawa

Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang

Sebelah Barat : Kota Semarang

Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km.

Luas wilayah seluruhnya ± 89.743 ha yang terdiri atas 14 kecamatan, 241 desa dan 6 kelurahan.

Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawan yang mencapai luas 50.087 Ha (56%) dan selebihnya adalah lahan kering, tekstur tanahnya terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 Ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 Ha.

Dilihat dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi), wilayah Demak terletak mulai dari 0 – 100 m yang dibatasi atas tiga region:

Region A : Elevasi 0 – 3 m meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang,

Demak, Karang Tengah, Mijen, Sayung dan Wedung

Region B : 1. Elevasi 3 – 10 m, meliputi sebagian besar dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Demak

2. Elevasi 10 – 25 m, meliputi sebagian besar dari Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen.

3. Elevasi 25 – 100 m, meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.

Region C : Elevasi lebih dari 100 m, meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

b. Keadaan Masyarakat di Kabupaten Demak

Dalam membahas masalah ini akan meliputi:

- jumlah penduduk
- penggolongan penduduk mengenai jenis kelamin, umur dan agama.

Selanjutnya secara singkat akan diuraikan tentang masalah keadaan sosial ekonomi tersebut di atas.

1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan hasil registrasi penduduk adalah 990.660 jiwa. Dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya adalah 1,06 persen.

Tingkat pertumbuhan pada tahun-tahun terakhir ini semakin rendah, hal ini disebabkan antara lain karena faktor keberhasilan program Keluarga Berencana yang telah melampaui target yang dicanangkan oleh Pemerintah.

2) Penggolongan Penduduk

Penggolongan penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Demak terdiri dari pria berjumlah 494.156 orang dan wanita 496.444 orang.

Sehingga dari data tersebut tampak bahwa jumlah wanitanya lebih banyak dibandingkan jumlah prianya.

Penggolongan penduduk menurut agama di Kabupaten Demak secara makro adalah beragama Islam yaitu 986.205 orang (99,65 persen), namun masih ada penganut agama lain dengan jumlah yang sangat relatif kecil.

Penggolongan penduduk menurut kewarganegaraan di Kabupaten Demak berdasarkan tahun 2001 hanya terdapat 5 (lima) warga negara asing. Hal ini dikarenakan warga negara asing yang tinggal sementara tidak melapor.

A4. Tinjauan Umum Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang:

- a. jenis-jenis responden
- b. keadaan responden

Berikut ini akan diuraikan hal-hal tersebut di atas

a. Jenis-jenis Responden

Pada bab III telah dikemukakan bahwa jumlah responden yang dipilih adalah 40 orang. Responden terdiri dari pewaris sebanyak 10 responden dan ahli waris sebanyak 30 responden, sedangkan nara sumber terdiri dari pemuka/ tokoh masyarakat (camat/ lurah/ kepala desa) dan kyai/ulama dan pejabat dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

b. Keadaan Responden

Mengenai masalah ini, hanya akan dikemukakan keadaan sosial ekonomi responden pewaris dan ahli waris saja. Untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap mengenai keadaan responden perlu diuraikan mengenai jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan mereka.

1) Jenis Kelamin

Adapun jenis kelamin dari jumlah responden pewaris dan ahli waris adalah 36 pria terdiri dari 9 pewaris dan 27 ahli waris, sedangkan jumlah responden wanita 4 orang terdiri atas 3 orang ahli waris dan 1 pewaris.

2) Umur Responden

Batasan umur yang dijadikan responden dalam penelitian ini yang termuda adalah 21 (dua puluh satu) tahun.

Pengelompokan umur responden tersebut di atas didasarkan bahwa pada umur-umur tersebut responden sudah dewasa. Sehingga diharapkan responden seumur itu dapat memberikan informasi yang akurat dan kemungkinan mereka telah melangsungkan perkawinan serta mendapatkan bakal (modal) dari warisan orang tuanya. Jumlah responden pewaris yang terbanyak adalah yang berada pada kelompok umur 51 sampai dengan 60 tahun, kemudian yang terbanyak kedua adalah umur 61 tahun keatas hal ini disebabkan karena pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia pada umumnya dilakukan pada waktu orang tua (pewaris menjelang usia lanjut, yaitu pada masa-masa usia tersebut. Sedangkan pada golongan ahli waris yang menerima harta warisan pada

umumnya terjadi pada kelompok umur antara 25 – 40 tahun, hal ini disebabkan pada saat itu ahli waris telah telah melangsungkan perkawinan.

Pengelompokan umur responden dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pengelompokan Umur Pewaris.

Responden Pewaris = 10

Kelompok Umur Pewaris	Responden
40 – 50	1
51 – 60	5
61 – 70	3
71 – keatas	1
Jumlah	10

Tabel 2. Pengelompokan Umur Ahli Waris

Responden Ahli Waris = 30

Kelompok Umur Ahli Waris	Responden
21 – 25	3
25 – 30	14
31 – 40	9
41 - 50	4
Jumlah	30

3) Pendidikan

Tingkat pendidikan responden dikelompokkan berdasarkan pendidikan formal, dan tingkat yang paling rendah tidak bersekolah sampai dengan tingkat paling tinggi yaitu perguruan tinggi, berdasarkan kenyataan yang ada pada masyarakat. Secara rinci tingkat pendidikan para responden dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tingkat Perguruan Tinggi (untuk pewaris = tidak ada, ahli waris = 4)
2. Tingkat Akademi (Pewaris = tidak ada, ahli waris = 3)
3. Tingkat SLTA (pewaris = 2, ahli waris = 10)
4. Tingkat SLTP (pewaris = 2, ahli waris = 7)
5. Tingkat SD (pewaris = 5, ahli waris = 6)
6. Non sekolah (pewaris = 1, ahli waris = tidak ada)

4) Pekerjaan Responden

Jenis pekerjaan responden bervariasi, yaitu petani, buruh, pedagang, wiraswasta, pegawai swasta, pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri.

B. Pembahasan

Dalam menganalisa hasil penelitian tentang “Pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Hukum Waris Adat pada Masyarakat di Kabupaten Demak”, akan dibahas unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan pewarisan antara lain proses pewarisan, harta warisan, cara pelaksanaan peralihan harta warisan, cara pembagian harta warisan dan ahli waris dan bagian masing-masing. Sehingga berdasarkan unsur-

unsur tersebut, dapat diketahui bagaimana pengaruh Hukum Waris Islam terhadap masyarakat adat di Demak yang mayoritas beragama Islam.

Pemikiran tersebut bertitik tolak pada asumsi bahwa masyarakat beragama Islam dalam bidang hukum, seharusnya mengikuti hukum agama, termasuk hukum waris. Apakah dalam kenyataan demikian, hal ini akan terbuka dari hasil penelitian.

B1. Pelaksanaan Pewarisan

Menurut Hukum Adat, pewarisan merupakan suatu proses peralihan atau pengoperan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Proses pewarisan ini dapat terjadi pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu orang tua (pewaris) sudah meninggal dunia. Proses pewarisan itu dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dengan cara pemberian dan kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan demikian proses pewarisan menurut Hukum Adat merupakan dua tahap yaitu tahap regenerasi harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup dan tahap regenerasi harta kekayaan pada waktu pewaris sudah meninggal dunia.

Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang essensial dalam Hukum Waris Adat. Timbulnya dua tahap regenerasi ini terjadi karena harta keluarga yang terdiri dari harta asal suami, harta asal isteri dan harta bersama merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Harta itu yang nantinya akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan keturunan keluarga itu. Oleh karena itu keturunan (anak) merupakan hal yang penting

dalam kehidupan keluarga dan merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan, yaitu untuk meneruskan angkatan atau keturunan. Sehingga kematian pewaris tidak begitu berpengaruh pada peralihan dan pengoperan harta warisan. Oleh karena itu pada masyarakat yang warganya yang beragama Islam, seharusnya proses pewarisan yang pada masyarakat tersebut adalah tahap regenerasi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat di Demak lebih dari separo responden dan ahli waris yang berjumlah 30 orang menyatakan proses pewarisan berlangsung pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup. Selanjutnya untuk lebih jelas dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 3. Proses Pewarisan
Responden Ahli Waris = 30

No	Proses Pewarisan	Ahli Waris
1	Sebelum pewaris meninggal dunia	18
2	Sesudah pewaris meninggal dunia	11
3	Sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia	1
	Jumlah	30

Sumber : Data primer Maret – April 2003

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa proses pewarisan masih didominasi oleh tradisi yang telah dianut secara turun temurun. Hal ini disebabkan kuatnya pandangan masyarakat terhadap suatu kebiasaan yang telah ada dan dianggap baik. Di samping itu proses pewarisan ditentukan pula oleh sikap dan tindakan orang tua (pewaris) dalam menentukan peralihan dan pengoperan harta warisannya. Sikap dan tindakan orang tua itu timbul dari rasa

kekawatiran sesuatu hal yang mungkin terjadi di antara hasil waris dengan adanya harta warisan.

Faktor “menghindari perselisihan antar ahli waris setelah pewaris meninggal dunia” nampaknya merupakan salah satu unsur yang dominan yang mendorong orang tua (pewaris) melakukan pembagian harta warisan. Tujuan pewaris membagi sendiri harta warisan adalah untuk menghindari perselisihan antar ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, pewaris menghendaki pembagian secara adil.

Dengan demikian orang tua tidak menghendaki timbulnya persengketaan harta warisan di antara ahli waris, yang berakibat putusya hubungan kekeluargaan, kelak kemudian hari. Untuk menghilangkan kekawatiran itu berdasarkan kekuasaan atas harta tersebut dan kewibawaannya, orang tua membagi sendiri harta warisan. Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dilakukan sendiri oleh pewaris adalah cara yang paling dominan dilakukan, sedangkan cara yang kedua adalah pembagian warisan berdasarkan musyawarah ahli waris atas permintaan pewaris. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Pembagian Harta Warisan
Responden Ahli Waris = 30

No	Pembagi Waris	Responden
1	Pewaris	18
2	Musyawarah ahli waris (atas permintaan pewaris)	10
3	Lain-lain (tokoh masyarakat/Kyai)	2
	Jumlah	30

Sumber : Data primer Maret – April 2003

Dengan demikian dalam masalah proses peralihan dan pengoperan harta warisan di masyarakat Demak masih mengikuti tradisi yang telah ada yaitu menurut sistem Hukum Adat. Sehingga tradisi-tradisi tersebut berpengaruh terhadap agama dengan ditopang para pemuka masyarakat (adat) dan dibentengi oleh sifat kolektivisme.

Sifat kebersamaan dalam kolektivisme ini adalah merupakan unsur penting dalam tata kehidupan keluarga maupun masyarakat. Sehingga sifat kebersamaan ini berakibat bahwa ahli waris tidak lagi mempersoalkan sama atau tidaknya mengenai pembagian warisan yang diterima, akan tetapi yang diutamakan adalah rasa kerukunan di antara para ahli waris.

Pelaksanaan peralihan dan pengoperan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi “seketika” artinya harta warisan itu dimiliki dan dikuasainya secara langsung. Di samping itu atas harta warisan hanya “hak penguasaan” yang beralih artinya hak milik harta warisan itu masih dimiliki pewaris, sedangkan ahli waris hanya disertai hak pemanfaatan atau pengelolaan harta tersebut. Kemudian cara yang terakhir dari peralihan dan pengoperan adalah “penunjukkan” artinya ahli waris hanya ditunjukkan bagian masing-masing, tetapi baik harta warisan maupun hak penguasaannya belum beralih dan masih dikuasai orang tua. Sedangkan pemilikan dan penguasaan harta warisan itu baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia.

Proses peralihan dan pengoperan harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, yang berlaku di masyarakat Demak pada umumnya berlangsung seketika dengan hak pemilikan.

Peralihan dan pengoperan harta warisan yang berupa “hak penguasaan” merupakan cara kedua yang dilakukan oleh responden. Dengan hanya menyerahkan hak penguasaan saja oleh pewaris berarti belum ada penyerahan secara nyata harta warisan itu, karena ahli waris ada yang belum dewasa. Kekawatiran pewaris timbul akibat adanya penyerahan hak penguasaan harta warisan tersebut adalah:

1. Ahli waris tidak mengelola atau menggunakan harta warisan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan.
2. Adanya kemungkinan tergodanya ahli waris untuk menjual harta warisan itu
3. Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang mendesak dan memerlukan biaya besar.

Sehingga dengan adanya hak milik warisan belum beralih, maka pewaris masih dapat mengambil kembali harta tersebut.

Penunjukkan sebagai salah satu cara terakhir dalam proses peralihan dan pengoperan harta warisan, nampaknya di masyarakat Demak merupakan hal yang paling jarang dilakukan. Perbuatan penunjukkan ini sebenarnya merupakan salah satu cara untuk menyatakan suatu wasiat atau wekas (Jawa). Dan penyerahan itu dilakukan secara lisan dihadapan isteri, anak-anak dan keluarga dekat. Motivasi adanya penunjukkan dalam proses pewarisan adalah suatu usaha untuk mencegah perselisihan antar ahli waris. Di samping itu agar pembagian itu memenuhi rasa keadilan menurut anggapan pewaris. Namun demikian, penunjukkan sebagai salah satu cara proses pewarisan tidak banyak digunakan oleh masyarakat Demak, sebab jumlah warisan sedikit, pewaris

masih memerlukan dan para ahli waris belum membutuhkan sekali terhadap harta warisan tersebut.

Mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat terjadi “Pada saat anak-anak sudah dewasa” karena dianggap sudah mampu dan untuk melatih mengelola sendiri harta warisan serta mempersiapkan perkawinan. Di samping itu harta diberikan “Pada saat anak-anak melangsungkan perkawinan” artinya apabila salah satu anak akan melangsungkan perkawinan diberikan sebagian dari harta warisan yang merupakan modal dasar untuk memasuki kehidupan baru. Cara inilah yang paling sering dilakukan karena hal ini sesuai dengan fungsi harta keluarga yaitu untuk kepentingan anggota keluarga, sedangkan untuk anggota keluarga yang akan memulai hidup berumah tangga sendiri memerlukan modal yang tidak sedikit, apalagi belum mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan pokok sendiri.

Sedangkan harta warisan dapat diberikan “setelah anak melangsungkan perkawinan” dengan suatu asumsi harta warisan tersebut akan digunakan untuk lebih memperkuat tata kehidupan rumah tangga. Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris berdasarkan kedewasaan paling jarang dilakukan, karena kedewasaan ahli waris belum menjamin kelangsungan harta warisan. Hal ini menimbulkan rasa khawatir dari pewaris, apabila harta tersebut habis dijual oleh ahli waris. Sehingga pada gilirannya akan menyusahkan pula baik dirinya sendiri, ahli waris yang lain, maupun pewaris. Agar mendapat gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 5. Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia
Responden Ahli Waris = 30

No	Pelaksanaan	Responden
1	Pada saat dewasa	5
2	Pada saat melangsungkan perkawinan	8
3	Setelah melangsungkan perkawinan	17
	Jumlah	30

Sumber : Data primer Maret – April 2003

Mengenai peralihan dan pengoperan harta warisan setelah pewaris meninggal dunia banyak dilakukan oleh responden-responden yang berasal dari daerah- daerah yang banyak terdapat pondok pesantrennya, yaitu daerah Wonosalam, karena pengetahuan dan penghayatan masyarakat tersebut terhadap Hukum Islam sudah lebih jauh. Akibatnya dalam hal waris-mewaris mereka mengikuti Hukum Waris Islam yaitu proses pewarisan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

Namun demikian pelaksanaan proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia tersebut dilakukan setelah upacara selamatan 40 hari, 100 hari atau 1000 harinya kematian si pewaris, karena pada saat itu suasana duka yang meliputi keluarga pewaris sudah hilang dan sudah tidak memerlukan biaya lagi sehingga harta warisan sudah bebas dari beban yang ada. Jadi di daerah tersebut masih tetap memberlakukan adat istiadat setempat.

Dalam pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan oleh janda, musyawarah ahli waris atau bila perlu dengan petunjuk ulama atau tokoh masyarakat seperti lurah/ kepala desa/ camat. Hal ini berdasarkan perolehan data dari responden ahli waris yang memperoleh harta

warisan dari pewaris setelah pewaris meninggal dunia, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 6. Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Meninggal Dunia
Responden Ahli Waris = 11

No	Pelaku Pembagian Harta Warisan	Responden
1	Janda	3
2	Musyawarah ahli waris dengan atau tanpa petunjuk ulama/tokoh masyarakat (camat/lurah)	7
3	Lain-lain (paman/saudara lain)	1
	Jumlah	11

Sumber : Data primer Maret – April 2003

Musyawarah keluarga sebagai sarana untuk membahas masalah pembagian harta warisan, masih tampak menonjol pada masyarakat Demak. Hal ini juga menunjukkan asas musyawarah yang dikenal dalam Hukum Adat masih memegang peranan penting, untuk menyelesaikan segala sesuatu baik di kalangan keluarga maupun di masyarakat desa pada umumnya.

Dalam musyawarah untuk menyelesaikan harta warisan, nampaknya para ahli waris masih memerlukan pendapat atau saran dari para ulama (kyai). Peranan ulama atau kyai atau pemuka masyarakat pada masyarakat Demak masih sangat menonjol. Ketaatan dan kepatuhan pada ulama atau kyai atau pejabat desa tersebut karena mempunyai keistimewaan-keistimewaan, baik jasmani atau rohani. Keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya adalah ia dianggap mempunyai kekuatan batin yang tinggi ataupun masih keturunan orang besar.

Pengaruh kehidupan agama masih sangat kuat pada masyarakat tersebut, terutama mengenai kegiatan-kegiatan bersifat keagamaan yang harus

diselenggarakan secara bersama, misalnya memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Miraj, Nuzulul Qur'an dan sebagainya.

B2. Harta Warisan

Mengenai harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris nampaknya sebagian besar adalah benda-benda berwujud biasa. Sedangkan benda-benda yang dianggap mengandung kekuatan magis, sangat jarang ditemukan di wilayah Demak, dari 30 responden ahli waris tidak ada responden yang mengakui menerima benda-benda bersifat magis misalnya berupa keris pusaka atau tombak, atau hal-hal yang lain bersifat magis, pada masa sekarang ini adalah tidak ada gunanya sebab di samping bersifat syirik, juga didasarkan pada realita bahwa yang diutamakan adalah memikirkan kelangsungan hidup rumah tangganya.¹⁾

Dengan demikian alam pikiran warga masyarakat Demak sudah tidak menganggap lagi bahwa benda-benda pusaka seperti keris, tombak dan lain sebagainya mengandung kekuatan magis. Hal ini disebabkan adanya pengaruh agama Islam, juga dipengaruhi oleh proses modernisasi. Perubahan pola pikir tersebut tidak lain adalah semakin populernya peranan kyai atau ulama dalam masyarakat. Tabel di bawah ini menunjukkan bentuk-bentuk harta warisan yang diterima oleh para responden:

¹⁾ Wawancara Responden Ahli Waris, SN, 27 Maret 2003

**Tabel 7. Bentuk Harta Warisan
Responden = 40**

No	Jenis Harta Warisan	Responden		
		Pewaris	Ahli Waris	
1	Uang/uang hasil penjualan harta warisan	1	4	
2	Kesatuan benda (tanah, sawah, rumah)	2	24	
3	Kesatuan benda yang dinilai dengan uang (misal: emas)	3	2	
	Jumlah	10	30	40

Sumber : Data primer Maret – April 2003

Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris, sebagian besar dipandang hanya semata-mata bernilai ekonomis, tetapi nilai ekonomis tersebut nampaknya tidak bersifat matematik dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris dapat berupa uang, atau uang dari hasil penjualan harta warisan, kesatuan benda dan kesatuan benda yang dinilai uang.

Harta warisan yang diterima oleh ahli waris atau yang diwariskan oleh pewaris pada masyarakat Demak paling banyak adalah kesatuan benda seperti rumah, sawah, ladang/ pekarangan.

Dengan demikian menunjukkan bahwa masyarakat Demak dalam pembagian harta warisan masih memperhatikan asas kerukunan dan kebersamaan di antara ahli waris dan tidak bersifat individualistis. Sifat yang tidak individualistis ini pada masyarakat Demak tampak bahwa, bagian harta warisan yang diterima tidak selalu sama atau hampir sama dari masing-masing ahli waris.

B3. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Pada prinsipnya ahli waris adalah orang-orang yang ada hubungan darah dengan pewaris. Di antara mereka ada ahli waris utama yaitu anak kandung (keturunan langsung pewaris). Oleh karena itu janda adalah bukan ahli waris, demikian pula dalam yurisprudensi (Keputusan Raad Van Yustisi Jakarta 13 Mei 1939). Akan tetapi yuriprudensi setelah kemerdekaan menetapkan bahwa janda adalah ahli waris (Keputusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Sip/1960). Keputusan Mahkamah Agung itu sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat, tetapi ada sebagian masyarakat masih menganggap janda bukan ahli waris. Demikian pula kenyataan yang masih hidup dalam masyarakat Demak yang menganggap janda bukanlah ahli waris.

Meskipun janda bukan ahli waris, janda masih berhak atas harta peninggalan suami sebagai jaminan hidupnya. Setidak-tidaknya kehidupan janda menjadi tanggung jawab anak-anaknya yang menerima warisan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Macam Ahli Waris
Responden = 30 Ahli Waris, 10 Pewaris

No	Ahli Waris	Responden Ahli Waris	Responden Pewaris
1	Anak	16	7
2	Anak dan isteri	13	2
3	Lain-lain	1	1
	Jumlah	30	10

Sumber : Data primer Maret – April 2003

Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Sip/1960 yang sudah berjalan lebih dari 40 tahun, belum mampu menggeser sebagian pandangan masyarakat tentang janda bukan sebagai ahli waris.

Kedudukan isteri bukan sebagai ahli waris, di daerah Demak mempunyai alasan-alasan tersendiri yaitu:

1. Hakikat dari perkawinan adalah terbentuknya keluarga dan selanjutnya untuk kelangsungan hidup keluarga yang telah ada serta sekaligus berupaya untuk kelangsungan hidup keluarganya sendiri. Untuk kehidupan keluarga itu diperlukan adanya harta benda dan harta itu diusahakan oleh keluarga inti (suami dan isteri) dikelola dan diurus untuk kepentingan dirinya dan anak keturunannya. Isteri sebagai bagian anggota, keluarga, maka isteri berhak mendapatkan jaminan hidup dari harta peninggalan suaminya. Tetapi isteri berkewajiban mengelola dan mengurus harta benda tersebut untuk kebutuhan hidup anak-anaknya. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak dibagi secara keseluruhan.
2. Sebagai suatu pemenuhan kewajiban anak terhadap orang tua (janda) antara lain untuk merawat dan memelihara orang tua pada hari tuanya, sehingga orang tua merupakan tanggung jawab anak-anak keturunannya. Oleh karena itu dalam sisa-sisa hidupnya akan mengikuti salah satu dari anak-anaknya. Dengan kata lain, walaupun janda (orang tua yang hidup terlama) tidak mendapatkan bagian harta warisan (bukan ahli waris) akan tetap terjamin hidupnya.²⁾

²⁾ Wawancara, SL, K, YD, 28 Maret 2003

Walaupun janda bukan ahli waris, janda tidak dengan sendirinya tersingkir dari kehidupan keluarga, tetapi masih berhak menguasai harta yang ada dalam keluarga itu. Penguasaan harta tersebut untuk untuk kehidupan dirinya (janda), apabila tidak mempunyai anak. Sedangkan apabila ada anak, penguasaan harta itu untuk kepentingan dirinya (janda) dan anak-anaknya. Di samping itu pada saatnya berdasarkan hak penguasaan itu, janda dapat membagi-bagikan harta tersebut kepada anak-anaknya.

Dengan demikian, janda (orang tua yang hidup terlama) yang bukan ahli waris adalah bukan didasarkan kepentingan pribadinya melainkan lebih mengutamakan kepentingan keluarga atau anak-anaknya. Di samping itu, walaupun janda bukan ahli waris, akan tetap terjamin hidupnya, bahkan sering terjadi pula bahwa selama janda masih hidup, anak-anak tidak melakukan pembagian harta warisan ayahnya.

Namun dalam keadaan tertentu suami sebelum meninggal dunia memberikan warisan kepada isterinya. Pemberian ini didasarkan karena isteri bukan ahli waris, sehingga timbul kekawatiran suami tentang jaminan kehidupan isterinya, setelah pewaris meninggal dunia. Kekhawatiran timbul karena tidak ada harta asal isteri, tidak mempunyai harta bersama yang ada harta asal suami dan tidak ada anak, atau sifat kedurhakaan dari anak yang mengakibatkan ibunya hidup terlantar. Dengan bagian harta warisan yang diterima janda, akan mampu untuk membiayai hidupnya, biaya perawatan apabila ia sakit dan bahkan untuk biaya kematian. Bagian warisan yang diterima oleh janda biasanya sama rata dengan bagian anak-anaknya. Sehingga demikian pewaris tidak merasa berdosa

terhadap isterinya, yang telah ikut membina dan menata kehidupan rumah tangganya bersama-sama bahkan ikut pula mengumpulkan atau menciptakan harta bersama. Bagian yang sama antara isteri (janda) dan anak-anak merupakan salah satu unsur dari “bagian-bagian harta warisan yang diberikan pewaris kepada isteri”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini mengenai bagian-bagian isteri.

Tabel 9. Bagian Istri/Janda

Responden = 15

No	Bagian yang Diterima Istri	Responden
1	Sama dengan anak	11
2	Seperdelapan harta warisan	1
3	Lain-lain (lebih kecil/lebih besar)	3
	Jumlah	15

Sumber : Data primer Maret – April 2003

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat Demak menganggap bahwa janda adalah ahli waris, seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Sip/1960. Keputusan tersebut terletak pada kriteria pengertian ahli waris, tidak lagi berdasarkan hubungan darah akan tetapi hubungan lahir dan batin antara suami dan isteri (hubungan perkawinan). Berdasarkan kriteria tersebut maka janda adalah ahli waris almarhuum suaminya. Sedangkan berdasarkan Hukum Adat tradisional, janda adalah bukan ahli waris.

Bagian ahli waris atas harta warisan seperti telah disebutkan di atas bahwa bagian harta warisan yang diterima janda pada umumnya sama dengan bagian anak, maka dengan jumlah yang sama antara harta warisan yang diterima janda

dan anak-anaknya, hal ini berarti bahwa pengaruh Hukum Islam belum menyeluruh menyentuh Hukum Waris Adat. Menurut Hukum Waris Islam, janda yang mempunyai anak telah ditentukan bagiannya berdasarkan Al Qur'an Surat An Nissa ayat 11 dan 12 yaitu $\frac{1}{8}$ (seperdelapan).

Hasil wawancara para responden menyatakan, pembagian harta warisan dengan jumlah yang sama tersebut sudah merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Demak, sedangkan model pembagian menurut Hukum Islam sangat sulit pelaksanaannya. Di samping itu tampak pula alasan lain yaitu demi rasa keadilan, apabila bagian tiap-tiap ahli waris termasuk isteri adalah sama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep Hukum Waris Adat sebagaimana dirumuskan oleh hakim pada zaman Hindia Belanda mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, sebagian besar masih digunakan oleh masyarakat. Sedangkan sisanya sudah mulai menggunakan konsep Hukum Waris Adat yang sesuai yurisprudensi dan Hukum Islam. Hanya saja bagian yang diterima ahli waris tersebut, bukan karena pengaruh Hukum Islam, tetapi sesuai dengan Hukum Adat yang dirumuskan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/Sip/1960. Oleh karena itu terlepas dari bagian yang diterima, dengan kedudukan janda yang diakui secara yuridis formal oleh yurisprudensi Mahkamah Agung akan lebih memperkuat hak-haknya janda terutama sehubungan dengan pihak-pihak lain apabila terjadi persengketaan. Walaupun bukan sebagai ahli waris, sebenarnya kedudukan janda relatif terjamin.

Mengenai ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan nampaknya ada yang menyatakan bahwa bagian ahli waris laki-laki sama dengan bagian ahli waris perempuan, tetapi juga ada yang membedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Alasan bagi pewaris memberikan bagian yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan karena kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan terhadap orang tua adalah sama. Jadi dirasakan tidak adil, bagian sesama anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan. Sedangkan bagi pewaris yang membedakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan didasarkan alasan bahwa anak laki-laki dalam perkawinan akan bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Tabel di bawah ini menguraikan bagian-bagian dari ahli waris (anak laki-laki dan perempuan).

Tabel 10. Bagian Ahli Waris

Responden = 30

No	Bagian Harta Warisan	
1	Sama persis	15
2	Hampir sama	9
3	Laki-laki dan perempuan 2 : 1	4
4	Laki-laki lebih besar/lebih kecil dari perempuan	2
	Jumlah	30

Sumber : Data primer Maret – April 2003

Dengan demikian pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat Demak sebagai berikut: yang pertama bagian laki-laki dan perempuan adalah

sama persis, yang kedua bagian laki-laki dan perempuan hampir sama, yang ketiga bagiannya adalah 2 banding 1.

Pembagian harta warisan tersebut didasarkan atas asas kerukunan yang merupakan ukuran ideal dalam hubungan sosial yang berarti serasi dan selaras.

Dengan demikian penggunaan asas kerukunan dan kesamaan hak dalam pembagian harta warisan perlu diperlakukan rasa adil dengan memperhatikan keadaan masing-masing ahli waris. Sehingga tetap dipertahankan hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam menikmati dan memanfaatkan serta menyelesaikan masalah pembagian harta warisan. Dengan berpangkal tolak dari sila-sila Pancasila maka dalam Hukum Waris Adat bangsa Indonesia, bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kebersamaan hak dalam pewarisan juga terdapat asas-asas hukum yaitu:

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri, adalah merupakan asas dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah pewarisan.
- b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, adalah merupakan suatu asas untuk diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam cara pembagian maupun cara pemanfaatan harta warisan, dengan selalu memperhatikan para ahli waris yang hidupnya kekurangan.
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan, adalah merupakan suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus, menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak

terbagi-bagi ataupun dalam penyelesaian masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

- d. Asas Musyawarah dan mufakat, adalah merupakan suatu asas yang dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota ahli waris mempunyai tanggung jawab yang sama atau hak dan kewajiban yang sama.
- e. Asas keadilan dan pamirma, adalah merupakan asas welas asih terhadap para anggota keluarga pewaris, karena keadaan, kedudukan, jasa dan sejarahnya.

Asas-asas tersebut pada umumnya tampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi asas-asas tersebut juga berpengaruh dengan bidang-bidang Hukum Adat lain seperti Hukum Ketatanegaraan Adat, Hukum Perkawinan Adat, Hukum Pidana Adat.

Di samping asas-asas tersebut di atas, juga terdapat suatu asas bahwa anak laki-laki harus mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Model pembagian ini juga dikenal dalam masyarakat Demak, walaupun tingkat prosentasenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan asas kesamaan.

Hal ini menunjukkan adanya pengaruh Hukum Islam dalam hal pewarisan khususnya perbandingan bagian yang diterima oleh ahli waris serta kedudukan janda. Namun pengaruh tersebut nampaknya tidak merata. Berdasarkan hasil wawancara responden pemuka masyarakat atau kyai (ulama) dapat disimpulkan bahwa pengaruh Hukum Islam lebih kuat terjadi pada masyarakat yang lingkungan wilayahnya terdapat banyak pondok pesantrennya yaitu Kecamatan Wonosalam.

Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut untuk bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Demikian pula bagian isteri $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian harta warisan apabila tidak punya anak atau $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bila ada anak. Dengan kata lain semua yang berkaitan dengan kewarisan ditentukan dengan hukum Islam. Namun demikian pembagian untuk isteri seperti tersebut sangat jarang dilakukan atau bahkan sering juga terjadi penyimpangan-penyimpangan, misalnya pada masyarakat yang secara jelas dan tegas menganut sistem pembagian menurut Hukum Waris Islam, namun setelah terjadinya pembagian warisan pihak ahli waris laki-laki yang jumlah bagiannya dua kali dari jumlah bagian ahli waris perempuan memberikan sebagian harta warisan yang diterimanya, sehingga pembagiannya menjadi sama.

Dengan kata lain bahwa eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam pada masyarakat Demak adalah saling berdampingan dan mengisi, artinya penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Aturan Hukum Adat yang diberlakukan dengan sendirinya yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Di samping itu dahulu berlaku juga asas sepikul segendong, namun sekarang asas tersebut sudah ditinggalkan. Asas sepikul segendong adalah suatu asas yang telah lama dikenal oleh masyarakat desa yaitu bahwa anak laki-laki mampu membawa satu pikul dan anak perempuan hanya mampu membawa satu gendong artinya dalam pembagian harta warisan anak laki-laki berhak menerima 2 (dua) bagian sedangkan anak perempuan 1 (satu) bagian.³⁾

³⁾ Wawancara, H. MU, 26 Maret 2003

Proses pembagian harta warisan menurut Hukum Islam hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan proses pewarisan yang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia hanya melalui hibah atau wasiat. Pemberian hibah dilakukan, apabila ada salah satu anak melangsungkan perkawinan atau akan melakukan usaha dagang. Hibah ini dapat berupa tambak, sawah atau modal untuk berdagang dan akan diperhitungkan dalam pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Hibah dapat digunakan untuk memperlunak (menerobos) sistem Hukum Waris Unilateral, di samping itu juga sering digunakan pada sistem Hukum Waris Bilateral pada masyarakat Islam sebagai suatu cara untuk menghindarkan pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam masalah pembagian harta. Mengenai wasiat nampaknya tidak lagi menjadi model pembagian harta warisan untuk di masyarakat Demak. Namun demikian, dalam pelaksanaan wasiat sudah terpengaruh oleh Hukum Islam yaitu adanya jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan dan wasiat dapat diberikan kepada orang lain yang berjasa bagi pewaris. Masalah hibah atau wasiat nampaknya sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, karena masyarakat lebih suka melakukan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, atau pembagian harta warisan dilakukan oleh musyawarah ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Seiring dengan berkembangnya kota Demak sehingga mempengaruhi pola pikir dari masyarakatnya, sedikit demi sedikit menjadi masyarakat materialistis individualistis yang rasionalistis sehingga berpengaruh pula terhadap masalah pewarisan. Oleh karena itu timbul rasa tidak adil apabila bagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah tidak sama.

B4. Anak Angkat

Kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkat adalah bukan sebagai anak angkat tetapi hanya sebagai anak pemeliharaan. Namun demikian anak tersebut mempunyai kewajiban untuk membantu orang tua angkatnya. Sehingga dengan demikian anak tersebut berhak mendapatkan jaminan hidupnya. Mengenai hidupnya ini, ada anak angkat yang hanya mendapat nafkah dari orang tua angkat saja, atau ada yang di samping mendapat nafkah dari orang tua angkatnya, juga mendapat bagian harta warisan dari orang tua kandungnya.

Dengan demikian bahwa pengangkatan anak di Demak, tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga kedudukan anak angkat terhadap orang tua kandung tidak putus, atau dengan kata lain anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua kandungnya.

Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah lebih bersifat hubungan sosial bukan sebagai ahli waris. Walaupun anak angkat di Demak bukan sebagai ahli waris, tetapi tetap terjamin kehidupannya oleh orang tua angkatnya. Hal ini dikemukakan oleh ahli Fara'id di Kecamatan Demak bahwa anak angkat bukan ahli waris karena anak angkat bukan asobat atau golongan bukan asobat, karena dalam Hukum Islam tidak dikenal anak angkat. Mengenai jaminan kehidupannya, anak angkat mendapatkan hibahnya dari orang tua angkatnya. Selanjutnya dikatakan bahwa apabila selama hidupnya orang tua belum memberikan hibah, maka jumlah bagian yang diterima, didasarkan lamanya anak angkat itu berada di lingkungan keluarga tersebut dan diambilkan dari harta bersama orang tua angkat. Pemberian jaminan hidup kepada anak

angkat itu didasarkan hubungan, sikap dan perilaku yang baik anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Sehingga atas dasar keputusan inilah anak angkat berhak mendapatkan nafkah dari orang tua angkatnya. Dengan demikian nilai Hukum Adat beradaptasi ke dalam nilai Hukum Islam.

Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan bahwa Hukum Islam berpengaruh terhadap kedudukan anak angkat. Pengaruh ini nampaknya diterima oleh masyarakat adat karena didasarkan kepada pengertian ahli waris, karena anak angkat tidak ada hubungan (pertalian) darah dengan orang tua angkat maka anak angkat tidak akan menjadi ahli waris. Walaupun demikian kehidupan anak angkat tetap terjamin dengan adanya pemberian hibah/ wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Oleh karena itu masyarakat Demak, tidak mengenal ketentuan khusus tentang pengangkatan anak yang ada di Demak, sehingga tidak mempunyai akibat hukum dalam hal mewaris. Hal ini disebabkan bertentangan dengan Al Qur'an yaitu Al Ahzab ayat 4 dan 5.

Ayat 4 berbunyi:

..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Ayat 5 berbunyi:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang disanggupi oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Penyayang.

Dari ketentuan di atas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung, atau dengan kata lain memberikan kedudukan yang sama dengan anak kandung sendiri. Namun pengangkatan anak dalam pengertian terbatas artinya memperlakukan anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya adalah yang diperbolehkan oleh Hukum Islam.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, bahwa Hukum Waris Adat pada masyarakat yang beragama Islam tampaknya tidak semua bagian Hukum Waris Adat terpengaruh oleh Hukum Islam. Hal itu disebabkan berbagai faktor seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum agama yang tidak sama, dipegangnya prinsip dan konsep Hukum Adat yang dianggap sebagai pedoman dalam pembagian warisan atau karena perkembangan alam pikiran masyarakat yang mengarah kepada masyarakat modern.

Pada sebagian besar masyarakat Demak yang beragama Islam meskipun mereka memegang teguh teguh syariat Islam pada prinsipnya tetap mendasarkan pada Hukum Waris Adat yang mengutamakan sifat kerukunan dan dirasakan keadilannya, serta tidak mau mendasarkan pada perhitungan yang berbelit-belit. Dasar pikiran tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan masyarakatnya yang mengarah pada masyarakat modern yang bersifat rasionalistis yaitu bahwa laki-laki dan perempuan di masa sekarang ini tidak dibeda-bedakan.

B5. Penyelesaian Sengketa Pewarisan

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia, peranan pemuka masyarakat seperti camat/ lurah/ kepala desa nampaknya

memegang peranan penting apabila dalam musyawarah para ahli waris belum ditemukan kesepakatan. Sedangkan peranan kyai atau ulama tidak begitu menonjol hanya dalam pembagian harta warisan yang mendasarkan Hukum Islam murni, dan hal ini lebih sedikit terjadi.

Camat/ lurah/ kepala desa dianggap lebih mengetahui masalah keduniawian (dalam hal ini warisan yaitu Waris Adat), kyai atau ulama peranannya dianggap sangat menonjol khususnya dalam bidang kerokhanian. Hal ini terlihat dari kenyataan-kenyataan bahwa walaupun dalam ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian yang dilakukan oleh kyai atau ulama banyak menyinggung masalah Fara'id, namun kenyataannya warga masyarakat belum banyak menerapkan Hukum Waris Islam dalam pembagian warisan. Alasannya adalah mereka tidak akan membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal menerima warisan. Masyarakat pada umumnya belum mau menyelesaikan masalah warisan secara Hukum Waris Islam, tetapi masih mempertahankan penyelesaiannya secara Waris Adat.

Walaupun dalam penelitian tidak diketemukan terjadi sengketa warisan, namun apabila dilontarkan pertanyaan kepada responden "bagaimana kalau tidak terjadi kesepakatan pelaksanaan dalam pewarisan, siapa yang diminta untuk menyelesaikan". Dalam hal ini ada beberapa jawaban antara lain yaitu: ulama, lurah/ kepala desa, camat dan lain-lain. Pengertian "lain-lain" adalah orang lain (pengacara). Demikian pula apabila pertanyaan berikutnya "bagaimana kalau tetap belum terjadi kesepakatan, siapa lagi yang diminta untuk menyelesaikan.

Kemungkinan-kemungkinan jawaban yang tersedia adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama.

Jadi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama adalah alternatif terakhir dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dikarenakan anggapan masyarakat bahwa dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama akan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan.

Seperti disebutkan di atas bahwa alternatif terakhir penyelesaian sengketa warisan adalah Pengadilan dan Pengadilan Agama. Hal ini berkaitan dengan masalah kompetensi yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
- c. Wakaf dan shodaqoh.

Selanjutnya pasal 49 ayat 2 berbunyi:

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka masalah warisan bagi orang-orang yang beragama Islam ditangani oleh Pengadilan Agama. Oleh karena yang dicabut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah warisan bagi mereka yang beragama Islam, maka masalah sengketa warisan bagi mereka yang beragama lain tetap diperiksa

oleh Pengadilan Negeri. Sehubungan berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama penyelesaian perkara-perkara warisan yang telah masuk di Pengadilan Negeri, telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990. Berdasarkan surat edaran tersebut, perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Negeri sebelum tanggal 1 Juli 1990 diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini dikuatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan bahwa sejak 1 Juli 1990 perkara-perkara tentang warisan bagi orang Islam yang masuk Pengadilan Negeri harus ditolak dan disarankan untuk mengajukan ke Pengadilan Agama.

Sebenarnya masalah perkawinan dan kewarisan telah lama diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang melengkapi Peraturan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Namun pada kenyataannya kekuasaan Pengadilan Agama masih di bawah dibandingkan dengan Pengadilan Negeri di kalangan masyarakat Islam. Hal itu nampak pula dalam masyarakat Demak. Oleh karena itu perkara warisan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Demak jauh lebih banyak dibandingkan dengan Pengadilan Agama. Hal ini terbukti dari data yang diperoleh yaitu pada tahun 1999 sampai tahun 2002 jumlah perkara-perkara warisan yang diterima Pengadilan Agama yang relatif lebih kecil dari jumlah perkara yang diterima Pengadilan Negeri.

**Tabel 11. Jumlah Perkara Warisan di Pengadilan Negeri Demak
Dan Pengadilan Agama Demak**

No	Tahun	Pengadilan	
		Negeri	Agama
1	1999	12	2
2	2000	5	1
3	2001	2	0
4	2002	1	0

Sumber: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Demak

Jumlah perkara-perkara warisan relatif kecil yang diselesaikan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, tampaknya lebih menyukai menyelesaikan masalah warisan secara mufakat. Menurut para responden cara tersebut merupakan jalan yang terbaik karena sangat memalukan apabila masalah warisan yang dianggap masalah keluarga diketahui oleh masyarakat umum. Di samping itu biaya dan lamanya waktu berperkara adalah hal yang ditakutkan oleh masyarakat, apalagi kalau dengan menggunakan jasa orang lain (pengacara). Hal ini sesuai dengan jawaban semua responden bahwa dalam melakukan pembagian warisan tidak sampai menimbulkan sengketa, sehingga sampai ke pengadilan. Karena meskipun sifat individualistis dan rasionalistis telah memberi warna dalam kehidupan masyarakat Demak yang masih bersifat kegotongroyongan, namun demikian dengan kedua sifat tersebut bukan merupakan pemicu timbulnya persengketaan yang berkepanjangan. Hal-hal yang mengakibatkan perselisihan masih dapat diselesaikan dengan rasa kekeluargaan tanpa sampai ke pengadilan.

Hal ini terbukti dari 10 responden pewaris dan dari 30 responden ahli waris seluruhnya atau 100% menyatakan sepakat untuk menerima bagian yang diterima oleh masing-masing baik yang pembagiannya dilakukan oleh pewaris sendiri maupun pembagiannya didasarkan atas musyawarah antar ahli waris atau dilakukan oleh janda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Waris Adat pada masyarakat di Kabupaten Demak memang cukup dipengaruhi oleh faktor agama dalam hal ini Hukum Waris Islam, namun pengaruhnya tidak merata. Pada sebagian kecil masyarakat yang ada di lingkungan pusat penyebaran agama (daerah yang banyak terdapat pondok pesantrennya), pengaruh agama sangat tampak, hal ini dapat dilihat dari pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan berbeda, yaitu jumlah harta yang dibagikan untuk anak laki-laki adalah dua kali dari jumlah harta yang dibagikan untuk anak perempuan. Sedangkan pelaksanaan pembagian warisan hanya dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Meskipun waktu pelaksanaannya masih didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang merupakan suatu adat yaitu dilaksanakan setelah peringatan wafatnya si pewaris (seperti 40 hari, 100 hari atau 1000 hari). Padahal peringatan seperti tersebut tidak dikenal sama sekali dalam Hukum Islam.

Sedangkan untuk daerah-daerah di Demak pada umumnya pengaruh agama tidak cukup besar, hal ini terlihat dari pelaksanaan pembagian harta warisan yang banyak terjadi dilakukan pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dan pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki biasanya sama dengan bagian anak perempuan.

Pembagian warisan yang dilakukan pada masyarakat Demak yang sebagian besar mendasarkan pada Hukum Adat dan sebagian lagi mendasarkan Hukum Waris Islam, maka dapat disimpulkan dengan gambaran tersebut pengaruh agama Islam terhadap Hukum Adat sedemikian rupa sehingga terjadi persesuaian antara keduanya, meskipun prosentasenya lebih besar pada Hukum Waris Adat. Sehingga pengaruh Hukum Waris Islam belum merata dan menyentuh secara menyeluruh bagi masyarakat Demak yang mayoritas beragama Islam dan memegang syariat Islam.

Namun demikian hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam telah bersentuhan dan terjadi kontak antara kedua sistem hukum itu. Hal ini disebabkan karena prinsip rukun dan kebersamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa sebagai masyarakat adat.

2. Pelaksanaan Hukum Waris pada masyarakat Demak sebagian besar berdasarkan Hukum Adat. Pelaksanaan pewarisan pada umumnya dilakukan pada saat pewaris masih hidup, serta bagian ahli waris laki-laki biasanya sama dengan ahli waris perempuan. Dalam pelaksanaan pembagian warisan tersebut sebagian besar masyarakat Demak masih mengutamakan asas kerukunan dan kebersamaan diantara para ahli waris. Asas kerukunan dimaksudkan agar tetap terpelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus, menikmati dan

memanfaatkan harta warisan, atau dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan.

Pembagian harta warisan oleh pewaris pada masyarakat Demak yang berdasarkan pada Hukum Adat, kadang-kadang dalam prakteknya tidak secara murni Hukum Adat. Misalnya penentuan golongan ahli waris berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam, akan tetapi besarnya bagian ahli waris tetap berdasarkan Hukum Adat dengan asas kesamaan atau berdasar putusan pewaris dengan atau tanpa musyawarah dan mufakat sesuai dengan konsep Hukum Adat.

Peranan lurah/ kepala desa/ camat sebagai pejabat yang merupakan pemuka masyarakat masih tetap menonjol baik sebagai penasehat dalam musyawarah atau sebagai hakim perdamaian maupun sebagai saksi dalam pembagian harta warisan. Hanya pada sebagian kecil masyarakat yang benar-benar menerapkan Hukum Waris Islam murni yang memerlukan peranan kyai atau ulama atau ahli Faraid dalam menyelesaikan pembagian warisan.

3. Pelaksanaan pembagian waris terhadap janda yang belum banyak dilakukan karena kedudukan janda sebagai ahli waris belum dikenal secara merata di kalangan masyarakat Demak, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa janda bukan ahli waris. Namun karena perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh Hukum Waris Islam serta disebabkan faktor berubahnya alam pikiran rasionalistis

dan materialistis yang menuju masyarakat modern, maka janda telah banyak diperhitungkan sebagai ahli waris.

- a. Perubahan-perubahan mencolok yang terjadi setelah adanya pengaruh Hukum Waris Islam adalah mengenai kedudukan janda sebagai ahli waris yang tadinya belum banyak dikenal kalangan masyarakat Demak, sehingga pelaksanaan pembagian waris terhadap janda belum banyak dilakukan, maka dengan masuknya pengaruh Hukum Waris Islam yang menetapkan janda adalah ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan, janda telah banyak diperhitungkan sebagai ahli waris hanya saja perhitungannya tidak mutlak menggunakan Hukum Waris Islam, tetapi dengan musyawarah atau kebijaksanaan dari pewaris, bagian yang diterimanya sebagai ahli waris adalah lebih kecil atau maksimal sama dengan anak kandung. Dengan demikian pengaruh Hukum Waris Islam dirasakan belum seluruhnya menyentuh Hukum Waris Adat. Juga mengenai kedudukan anak angkat, dimana pada masyarakat Demak dahulu banyak yang menyamakan anak angkat sebagai anak kandung, namun karena adanya faktor pengaruh Hukum Islam dimana kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkat adalah bukan sebagai ahli waris, karena menurut Hukum Islam tidak dikenal anak angkat. Anak angkat hanya mendapat pemberian dari orang tua angkatnya. Ini Hukum Waris Islam tampak sangat berpengaruh, karena dalam Hukum Islam kedudukan anak angkat diletakkan di luar ahli waris. Sedangkan besarnya bagian pemberian

tergantung pada lamanya seorang anak menjadi anak angkat. Hal ini berarti kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Pemberian kepada anak angkat itu hanya didasarkan hubungan, sikap dan perilaku yang baik anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal ini juga sesuai dengan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan terhadap anak angkat diberi wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya. Dengan mengadaptasi nilai Hukum Adat secara terbatas ke dalam Hukum Islam tersebut orang tua angkat mempunyai tanggung jawab mengenai pemeliharaan kehidupan, demikian disebutkan dalam pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Dari kedua hal tersebut di atas yaitu mengenai kedudukan janda dan anak angkat maka pengaruh Hukum Waris Islam tampak cukup berpengaruh.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, bahwa Hukum Waris Adat pada masyarakat yang beragama Islam tampaknya tidak semua bagian Hukum Waris Adat terpengaruh oleh Hukum Islam. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum-hukum agama yang tidak sama, dipegangnya prinsip dan konsep Hukum Adat yang dianggap sebagai pedoman dalam pembagian warisan atau faktor-faktor lain.

- b. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan-perubahan tersebut di atas adalah karena faktor berubahnya alam pikiran masyarakat Demak yang tadinya masih bersifat sangat tradisional dan moderat,

tetapi dengan banyaknya ilmu pengetahuan dan majunya teknologi maka alam pikiran rasionalistis dan materialistis yang menuju masyarakat modern menjadi dasar pemikiran bagi kedudukan janda yang diberi bagian harta untuk kelangsungan hidupnya.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pembagian warisan hendaknya terus dibina prinsip rukun dan kebersamaan yang selama ini telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa (pada umumnya) sebagai masyarakat Demak (pada khususnya) dimana sebagian besar masyarakatnya memegang teguh syariat Islam, sehingga diantara ajaran Islam dan prinsip Hukum Adat terjadi persesuaian sehingga dapat diterima baik oleh masyarakat Islam.
2. Hendaknya menerima hal-hal baru yang dianggap menuju suatu keadilan yang sesuai dengan hak-hak yang memang sepantasnya diperoleh seseorang, maka sudah seharusnya masyarakat menyadari bahwa janda termasuk ahli waris yang berhak atas harta peninggalan, mewaris bersama-sama dengan anak, sehingga tetap diperhatikan hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan.
3. Dalam menuju suatu sistem kewarisan yang dapat diterima semua lapisan masyarakat adat Indonesia, dengan berpangkal pada asas dan kaidah Hukum Adat serta Hukum Agama, dalam hal ini Hukum Islam, maka penelitian-penelitian tentang eksistensi Hukum Waris Adat pada

masyarakat Islam yang ada di wilayah Indonesia (seperti Gresik, Madura dan daerah lain yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam) perlu ditingkatkan frekuensinya. Semakin banyak penelitian-penelitian yang dilakukan, maka akan memberikan kontribusi mengenai Hukum Waris, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah pewarisan dan dapat diterima oleh masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1978, *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung
- Amir Syarifudin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalm Lingkungan Adat Minagkabau*, Cetakan Pertama, Gunung Agung, Jakarta.
- A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bastian Tafal B, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta
- Bushar Muhammad, 1985, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djododigoeno, 1950, *Asas-asas Hukum Adat*, Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Djododigoeno, Tanpa Tahun, *Perjodohan dan Pewarisan*, Borobudur, Yogyakarta.
- Djoko Sukismo, 1989, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Kalangan Rakyat Indonesia Asli di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Januari
- Hilman Hadikusuma, 1983, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Waris, Adat*, Cetakan ketiga, Alumni, Bandung.
- Husein Djojodiningrat, 1963, *Islam di Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta.

- Iman Sudiyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Moch Koesnoe, 1979, *Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, Cetakan Pertama, Airlangga, University Press, Surabaya.
- Muhammad Ali As Shabun, 1998, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Cetakan Pertama, Diponegoro, Bandung.
- Sayuti Thalib, 1985, *Receptio A Contrario*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta.
- Soepomo, 1981, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Cetakan Keenam, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soepomo, 1983, *Hukum Adat dalam yurisprudensi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1987, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, PT Eresco, Bandung.
- Ter Haar, 1983, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Poesponoto, Cetakan Ketujuh, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Van Vollenhoven, 1981, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan Keenam, Sumur Bandung, Bandung.

Peraturan-peraturan:

- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama